



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

s.d 30 Juni 2018

Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Pemerintahan : 4 . 06 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 06 . 01 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 06 . 01 . 09 Biro Protokol dan Komunikasi Publik

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)
2	BELANJA	8.771.000.000,00	1.489.763.438,00	(7.281.236.562,00)
2 . 1	BELANJA OPERASI	8.495.477.100,00	1.489.763.438,00	(7.005.713.662,00)
2 . 1 . 1	Belanja Pegawai	543.728.000,00	142.945.000,00	(400.783.000,00)
2 . 1 . 2	Belanja Barang	7.951.749.100,00	1.346.818.438,00	(6.604.930.662,00)
2 . 2	BELANJA MODAL	275.522.900,00	0,00	(275.522.900,00)
2 . 2 . 2	Belanja Peralatan dan Mesin	275.522.900,00	0,00	(275.522.900,00)
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.771.000.000,00)	(1.489.763.438,00)	7.281.236.562,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(8.771.000.000,00)	(1.489.763.438,00)	7.281.236.562,00

Palangka Raya, 30 Juni 2018
Kepala Biro Protokol dan Komunikasi Publik

HM. ISTANI, SH

NIP. 19630704 198803 1 015



NERACA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 Per 30 Juni 2018 dan 30 Juni 2017

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan	: 4 . 06	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi	: 4 . 06 . 01	Sekretariat Daerah	
Sub Unit Organisasi	: 4 . 06 . 01 . 09	Biro Protokol dan Komunikasi Publik	
URAIAN	2018	2017	
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	
Kas di Bendahara Pengeluaran	527.592.800,00	151.894.285,00	
Kas di BLUD	0,00	0,00	
Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00	
Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00	
Kas yang dibatasi penggunaannya	0,00	0,00	
Kas Lainnya	0,00	0,00	
Setara Kas	0,00	0,00	
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	
Piutang Pendapatan	0,00	0,00	
Piutang Lainnya	0,00	0,00	
Penyisihan Piutang	0,00	0,00	
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00	
Persediaan	0,00	0,00	
JUMLAH ASET LANCAR	527.592.800,00	151.894.285,00	
INVESTASI JANGKA PANJANG			
Investasi Jangka Panjang Non Permanen			
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00	
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00	
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00	
Dana Bergulir	0,00	0,00	
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00	
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00	
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00	
Investasi Jangka Panjang Permanen			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00	
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00	
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00	
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00	
ASET TETAP			
Tanah	0,00	0,00	
Peralatan dan Mesin	2.944.239.920,00	3.187.941.171,00	
Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	
Akumulasi Penyusutan	(2.422.041.705,00)	(2.270.543.079,00)	
JUMLAH ASET TETAP	522.198.215,00	917.398.092,00	
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan	0,00	0,00	
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00	
ASET LAINNYA			
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00	
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	
Aset Lain-lain	0,00	0,00	
Tagihan TGR	0,00	0,00	
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	0,00	0,00	
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	
JUMLAH ASET LAINNYA	0,00	0,00	
JUMLAH ASET	1.049.791.015,00	1.071.560.710,33	
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00	
Utang Bunga	0,00	0,00	

Urusan Pemerintahan : 4 . 06	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 06 . 01	Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 06 . 01 . 09	Biro Protokol dan Komunikasi Publik

URAIAN	2018	2017
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Beban	0,00	260.501.250,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	260.501.250,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	0,00	260.501.250,00
EKUITAS		
EKUITAS	1.049.791.015,00	811.059.460,33
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.049.791.015,00	1.071.560.710,33

Biro Protokol dan Komunikasi Publik



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan	: 4 . 06	Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi	: 4 . 06 . 01	Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4 . 06 . 01 . 09	Biro Protokol dan Komunikasi Publik

URAIAN	2018	2017
EKUITAS AWAL	701.688.178,00	1.168.424.645,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(1.852.680.065,00)	(1.772.387.188,34)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	(38.980.536,00)	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	2.239.763.438,00	1.427.311.336,00
EKUITAS AKHIR	1.049.791.015,00	811.059.460,33

Palangka Raya, 30 Juli 2018
Kepala Biro Protokol dan Komunikasi Publik

HM. ISTANI, SH

NIP. 19630704 198803 1 015

Biro Protokol dan Komunikasi Publik

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2018, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja yang dipimpinnya.

Biro Protokol dan Komunikasi Publik Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah entitas akuntansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan Biro Protokol dan Komunikasi Publik Semester Pertama Tahun Anggaran 2018 ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) memberikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan sampai dengan 30 Juni 2018. Berdasarkan laporan ini realisasi Pendapatan semester pertama TA 2018 adalah nihil, sedangkan realisasi Belanja adalah sebesar Rp. 1.489.763.438,00 atau mencapai 16,99 % dari yang dianggarkan sebesar Rp. 8.771.000.000,00.
2. Laporan Operasional menyajikan informasi keuangan terkait dengan kegiatan operasional entitas. Dari Laporan Operasional tersebut diinformasikan bahwa nilai Pendapatan-LO adalah sebesar Rp. 0,00 serta nilai Beban-LO adalah sebesar Rp. 1.852.680.065,00
3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan

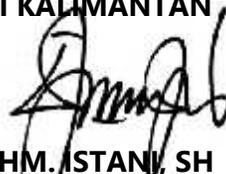
ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan laporan ini, ekuitas akhir Biro Protokol dan Komunikasi Publik semester pertama TA 2018 adalah Rp 1.049.791.015,00.

4. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas Biro Protokol dan Komunikasi Publik per 30 Juni 2018. Dari neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai aset adalah Rp 1.049.791.015,00, kewajiban Rp 0,00, dan ekuitas Rp1.049.791.015.
5. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksud agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang struktur organisasi, kebijakan keuangan, dan pencapaian target kinerja APBD, ikhtisar pencapaian kinerja keuangan, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Neraca.

Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Biro Protokol dan Komunikasi Publik Semester Pertama Tahun Anggaran 2018 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu, akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Diharapkan penyusunan laporan keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Palangka Raya, 31 Juli 2018

**KEPALA BIRO PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PUBLIK
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



**HM. ISTANI, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19630704 198803 1 015**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1		
Daftar Isi	3		
Pernyataan Tanggungjawab	5		
Ringkasan	6		
Laporan Realisasi Anggaran	6		
Laporan Operasional	7		
Laporan Perubahan Ekuitas	8		
Neraca	9		
Catatan atas Laporan Keuangan	13		
Bab I	Pendahuluan	13	
	1.1	Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan	13
	1.2	Landasan hukum penyusunan laporan keuangan	14
	1.3	Sistematika penulisan Catatan atas laporan keuangan	15
Bab II	Biro Protokol dan Komunikasi Publik, kebijakan keuangan, dan pencapaian target kinerja APBD	17	
	2.1	Biro Protokol dan Komunikasi Publik	17
	2.2	Kebijakan keuangan	25
Bab III	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan	26	
	3.1	Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan	26
Bab IV	Kebijakan Akuntansi	27	
	4.1	Entitas akuntansi/ entitas pelaporan keuangan daerah	27
	4.2	Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan	27
	4.3	Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan	29
	4.4	Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP	42
Bab V	Penjelasan pos-pos laporan keuangan	43	
	5.1	Rincian dari penjelasan setiap pos-pos laporan keuangan	43
		5.1.1 Pendapatan– LRA	43
		5.1.2 Belanja	43
		5.1.3 Pendapatan – LO	51

	5.1.4 Beban	51
	5.1.3 Aset	59
	5.1.4 Kewajiban	64
	5.1.5 Ekuitas	65
Bab VI	Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan	66
Bab VII	Penutup	67
Daftar Lampiran		

Biro Protokol dan Komunikasi Publik

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Biro Protokol dan Komunikasi Publik Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Semester Pertama Tahun Anggaran 2018 yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Operasional (LO); (c) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (d) Neraca; dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Semester Pertama Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan secara layak dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Palangka Raya, 31 Juli 2018

**KEPALA BIRO PROTOKOL
DAN KOMUNIKASI PUBLIK
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



**HM. ISTANI, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19630704 198803 1 015**

RINGKASAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan Keuangan, sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dan menyampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Biro Protokol dan Komunikasi Publik Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Semester Pertama Tahun Anggaran 2018 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

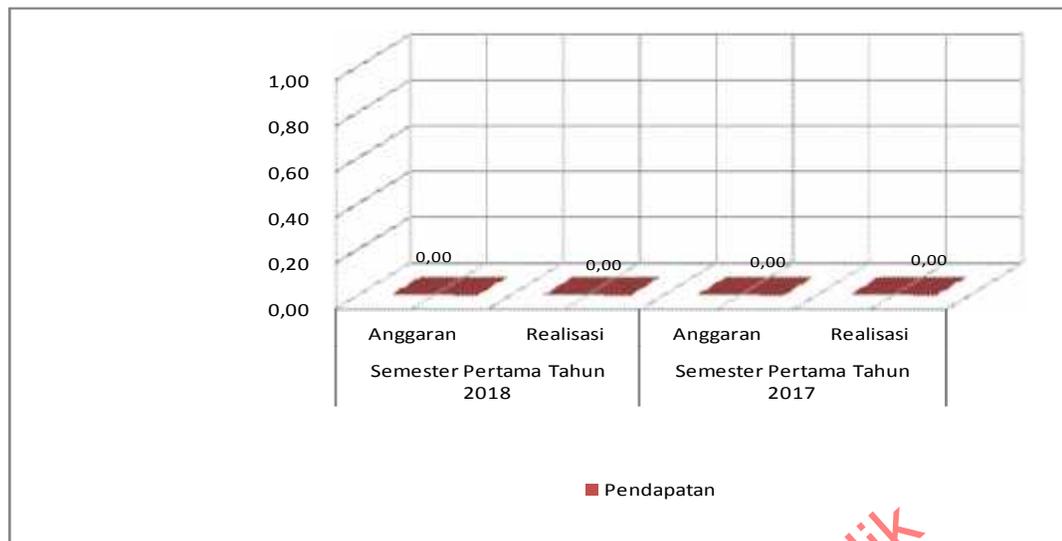
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) semester pertama tahun 2018 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan-LRA dan belanja selama periode (1 Januari s/d 30 Juni 2018). Realisasi pendapatan pada semester pertama Tahun Anggaran 2018 adalah nihil. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp 1.489.763.438,00 atau mencapai 16,99% dari anggarannya sebesar Rp8.771.000.000,00. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Semester Pertama Tahun 2018 dan Semester Pertama Tahun 2017 dapat disajikan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Semester Pertama Tahun 2018		Semester Pertama Tahun 2017	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja	8.771.000.000,00	1.489.763.438,00	7.496.300.000,00	777.311.366,00

Uraian	Semester Pertama Tahun 2018		Semester Pertama Tahun 2017	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00



Uraian	Semester Pertama Tahun 2018		Semester Pertama Tahun 2017	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Belanja	8.771.000.000,00	1.489.763.438,00	7.496.300.000,00	777.311.366,00



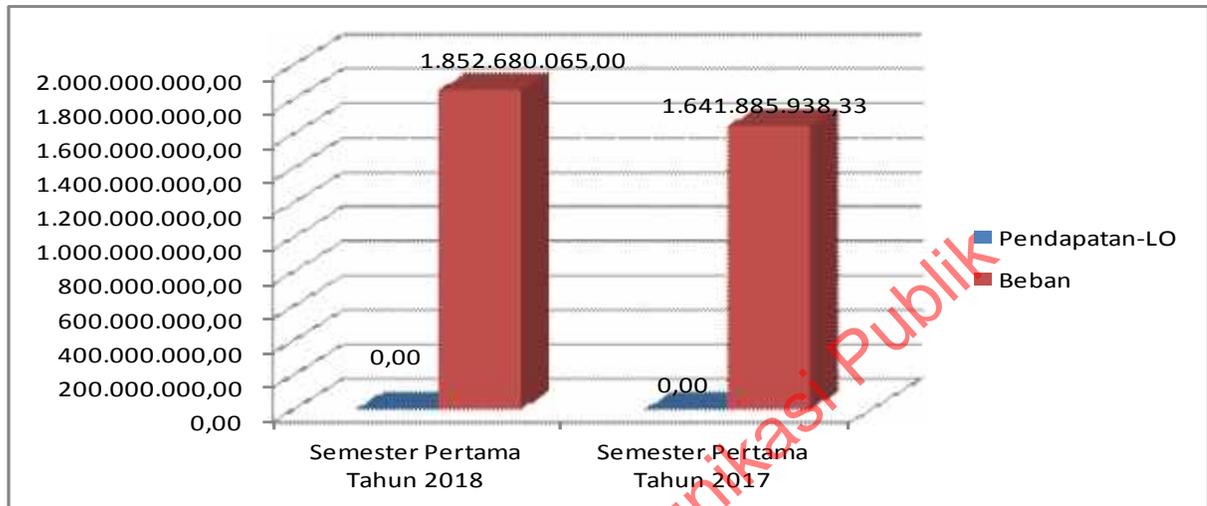
2. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional (LO) terdiri dari pendapatan – LO, beban, transfer, dan pos – pos luar biasa.

Pendapatan - LO pada semester pertama Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 0,00 dan beban sebesar Rp 1.852.680.065,00. Pendapatan – LO semester pertama TA 2017 sebesar Rp0,00 dan beban Rp 1.641.885.938,00. Ringkasan Laporan Operasional (LO) sampai dengan 30 Juni 2018 dan 30 Juni 2017 dapat disajikan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	30 Juni 2018	30 Juni 2017	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
Pendapatan-LO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Beban	1.852.680.065,00	1.641.885.938,33	210.794.126,67	11,38
Surplus/Defisit-LO	(1.852.680.065,00)	(1.641.885.938,33)	(210.794.126,67)	11,38



3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan disandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal sebesar Rp701.688.178,00. Kewajiban untuk dikonsolidasikan (surplus/defisit LRA) 2018 sebesar (Rp1.852.680.065,00). Koreksi ekuitas lainnya semester pertama 2018 sebesar (Rp38.980.536,00) sehingga ekuitas akhir 2018 sebesar Rp 1.049.791.015,00.

(dalam rupiah)

Uraian	30 Juni 2018	30 Juni 2017
Ekuitas awal	701.688.178,00	1.168.424.645,00
Surplus/Defisit - LO	(1.852.680.065,00)	(1.772.387.188,34)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		
- Koreksi Nilai Persediaan	-	-
- Selisih Revaluasi Aset Tetap	-	-
- Koreksi Ekuitas Lainnya	(38.980.536,00)	(12.289.332,33)
Kewajiban Untuk dikonsolidasikan	2.239.763.438,00	1.427.311.336,00
Ekuitas Akhir	1.049.791.015,00	811.059.460,33

4. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya. Jumlah aset per 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp1.049.791.015,00 yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp527.592.800,00, aset tetap sebesar Rp522.198.215,00, dan aset lainnya sebesar Rp0,00. Sedangkan kewajiban sebesar Rp0,00 dan ekuitas sebesar Rp1.049.791.015,00.

Ringkasan neraca per 30 Juni 2018 dan 30 Juni 2017 dapat disajikan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	30 Juni 2018	30 Juni 2017	Kenaikan / (Penurunan)
Aset			
- Aset Lancar	527.592.800,00	151.894.285,00	375.698.515,00
- Aset Tetap	522.198.215,00	917.398.092,00	(395.199.877,00)
- Aset Lainnya	0,00	2.268.333,34	(2.268.333,34)
Kewajiban	0,00	1.557.811.336,00	(1.557.311.336,00)
Ekuitas	1.049.791.015,00	(485.750.625,66)	1.535.541.640,66

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN



BIRO PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PUBLIK SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 2018 dan 30 Juni 2017

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		REALISASI 2017 (Rp)
		ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4	PENDAPATAN - LRA					
4. 1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	-	-	-	#DIV/0!	-
4. 1. 2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	-	-	-	#DIV/0!	-
4. 1. 2. 15.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	-	-	-	#DIV/0!	-
5	BELANJA					
5. 1.	BELANJA OPERASI	8.495.477.100,00	1.489.763.438,00	2.461.629.644,00	17,54	777.311.336,00
5. 1. 1.	BELANJA PEGAWAI	543.728.000,00	142.945.000,00	400.783.000,00	26,29	139.565.000,00
5. 1. 1. 01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	-	-	-	#DIV/0!	-
5. 1. 1. 02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	-	-	-	#DIV/0!	-
5. 1. 1. 03.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDHWKDH	-	-	-	#DIV/0!	-
5. 1. 1. 08	Belanja Honorarium PNS	175.400.000,00	0,00	175.400.000,00	-	0,00
5. 1. 1. 10	Belanja Honorarium Non PNS	368.328.000,00	142.945.000,00	225.383.000,00	38,81	139.565.000,00
5. 1. 2.	BELANJA BARANG DAN JASA	7.951.749.100,00	1.346.818.438,00	2.060.846.644,00	16,94	637.746.336,00
5. 1. 2. 01.	Belanja Bahan Pakai Habis	389.974.200,00	118.442.500,00	(271.531.700,00)	30,37	44.450.000,00
5. 1. 2. 01. 01	Belanja Alat Tulis Kantor	80.874.200,00	27.956.500,00	52.917.700,00	34,57	20.000.000,00
5. 1. 2. 01. 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	6.000.000,00	1.050.000,00	4.950.000,00	17,50	1.200.000,00
5. 1. 2. 01. 09	Belanja Dokumentasi	28.000.000,00	9.986.000,00	18.014.000,00	35,66	14.000.000,00
5. 1. 2. 01. 13	Belanja Baliho	275.100.000,00	79.450.000,00	195.650.000,00	28,88	9.250.000,00
5. 1. 2. 03.	Belanja Jasa Kantor	5.165.744.600,00	302.687.600,00	(4.863.057.000,00)	5,86	202.635.095,00
5. 1. 2. 03. 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	348.650.600,00	97.169.600,00	251.481.000,00	27,87	36.755.000,00
5. 1. 2. 03. 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	20.000.000,00	1.573.000,00	18.427.000,00	7,87	9.769.420,00
5. 1. 2. 03. 07	Belanja Paket/Pengiriman	31.344.000,00	0,00	31.344.000,00	-	0,00
5. 1. 2. 03. 13	Belanja Jasa Service Peralatan/Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	2.995.000,00	12.005.000,00	19,97	3.500.000,00
5. 1. 2. 03. 15	Belanja Jasa Iklan	250.000.000,00	46.500.000,00	203.500.000,00	18,60	0,00
5. 1. 2. 03. 18	Belanja Jasa Penyiaran Melalui Media Massa	505.000.000,00	99.600.000,00	405.400.000,00	19,72	89.160.675,00
5. 1. 2. 12. 20	Belanja Jasa Pihak Ketiga	3.995.750.000,00	54.850.000,00	3.940.900.000,00	1,37	63.450.000,00
5. 1. 2. 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	483.762.240,00	57.843.600,00	(425.918.640,00)	11,96	33.091.000,00
5. 1. 2. 06 01	Belanja Cetak	448.962.240,00	44.448.000,00	404.514.240,00	9,90	23.900.000,00
5. 1. 2. 06 02	Belanja Penggandaan	34.800.000,00	13.395.600,00	20.604.400,00	39,40	9.191.000,00
5. 1. 2. 06 03	Belanja Penjiplakan	800.000,00	0,00	800.000,00	-	0,00
5. 1. 2. 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	-	#DIV/0!	0,00
5. 1. 2. 08 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	0,00	-	#DIV/0!	0,00
5. 1. 2. 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.000.000,00	4.000.000,00	-	12,50	3.400.000,00
5. 1. 2. 11. 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	32.000.000,00	4.000.000,00	28.000.000,00	12,50	3.400.000,00
5. 1. 2. 14	Belanja Pakai Khusus dan Hari-hari Tertentu	35.750.000,00	35.750.000,00	-	100,00	0,00
5. 1. 2. 14 03	Belanja Pakai Batik Tradisional	35.750.000,00	35.750.000,00	-	100,00	-
5. 1. 2. 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.844.518.060,00	828.094.738,00	1.016.423.322,00	44,89	354.170.241,00
5. 1. 2. 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.494.518.060,00	706.675.803,00	787.842.257,00	47,28	260.682.600,00
5. 1. 2. 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	350.000.000,00	121.418.935,00	228.581.065,00	34,69	93.487.641,00
5. 1. 2. 23	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
5. 1. 2. 23 03	Belanja Bimbingan Teknis	0,00	-	-	#DIV/0!	-
5. 2.	BELANJA MODAL	275.522.900,00	-	(275.522.900,00)	-	-
5. 2. 1.	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-
5. 2. 1. 11.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	-	-	-	-	-
5. 2. 2.	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	275.522.900,00	-	(275.522.900,00)	-	-
5. 2. 2. 04.	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	-	-	-	-	-
5. 2. 2. 05.	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	-	-	-	-	-
5. 2. 2. 14.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	-	-	-	#DIV/0!	-
5. 2. 2. 15.	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	51.887.450,00	-	51.887.450,00	-	-
5. 2. 2. 16.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	113.113.750,00	-	113.113.750,00	-	-
5. 2. 2. 17.	Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	-	-	-	-	-
5. 2. 2. 18.	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	83.634.250,00	-	83.634.250,00	-	-
5. 2. 2. 19.	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi	26.887.450,00	-	26.887.450,00	-	-
5. 2. 2. 35.	Belanja Modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	-	-	-	#DIV/0!	-
5. 2. 3.	Belanja Gedung Dan Bangunan	-	-	-	#DIV/0!	-
5. 2. 3. 01.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	-	-	-	#DIV/0!	-
5. 2. 4.	Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan	-	-	-	-	-
5. 2. 4. 21.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik	-	-	-	-	-
5. 2. 5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	#DIV/0!	-
5. 2. 5. 01.	Belanja Modal Pengadaan Buku	-	-	-	-	-
5. 2. 5. 04.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	-	-	-	-	-
	SURPLUS / DEFISIT	(8.771.000.000,00)	(1.489.763.438,00)	(2.186.106.744,00)	16,99	(777.311.336,00)
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN	(8.771.000.000,00)	(1.489.763.438,00)	(2.186.106.744,00)	16,99	(777.311.336,00)

LAPORAN OPERASIONAL (LO)



BIRO PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PUBLIK SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 2018 dan 30 Juni 2017

NO.URUT	URAIAN	30 Juni 2018 Rp	30 Juni 2017 Rp	KENAIKAN/PENURUNAN Rp	(%)
1	2	3	4	5	6
8.	PENDAPATAN - LO				
8. 1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	-	-	-	#DIV/0!
8. 1. 2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	-	-	-	#DIV/0!
9.	BEBAN				
9. 1.	BEBAN OPERASI	1.852.681.065,00	1.641.885.938,33	210.795.126,67	11,38
9. 1. 1.	Beban Pegawai - LO	196.496.000,00	182.815.000,00	13.681.000,00	6,96
9. 1. 2.	Beban Barang dan Jasa	1.515.675.638,00	1.222.602.051,00	293.073.587,00	19,34
9. 1. 3.	Beban Bunga	-	-	-	-
9. 1. 4.	Beban Subsidi	-	-	-	-
9. 1. 5.	Beban Hibah	-	-	-	-
9. 1. 6.	Beban Bantuan Sosial	-	-	-	-
9. 1. 7.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	140.509.427,00	236.468.887,33	(95.959.460,33)	(68,29)
9. 1. 8.	Beban Penyisihan Piutang	-	-	-	-
9. 1. 9.	Beban Lain - Lain	-	-	-	-
9. 2.	BEBAN TRANSFER	-	-	-	-
9. 2. 1.	beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	-	-	-	-
9. 2. 2.	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
9. 2. 3.	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemda Lainnya	-	-	-	-
9. 2. 4.	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	-	-	-	-
9. 2. 5.	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	-	-
9. 2. 6.	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
9. 2. 7.	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa	-	-	-	-
9. 3.	DEFISIT NON OPERASIONAL	-	-	-	-
9. 3. 1.	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	-	-	-	-
9. 3. 2.	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	-	-	-	-
9. 3. 3.	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	-	-	-	-
9. 4.	BEBAN LUAR BIASA	-	-	-	-
9. 4. 1.	Beban Luar Biasa	-	-	-	-
	JUMLAH BEBAN	1.852.681.065,00	1.641.885.938,33	210.795.126,67	11,38
	SURPLUS/DEFISIT - LO	(1.852.681.065,00)	(1.641.885.938,33)	(210.795.126,67)	11,38

NERACA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
N E R A C A
BIRO PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PUBLIK SEKRETARIAT DAERAH
PER 30 JUNI 2018 DAN 30 JUNI 2017

(dalam rupiah)

URAIAN	30 Juni 2018	30 Juni 2017	Kenaikan (Penurunan)
			Jumlah
ASET			
ASET LANCAR			
Kas			
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	527.592.800,00	151.894.285,00	375.698.515,00
Investasi Jangka Pendek	-	-	-
Piutang			
Piutang Pendapatan	-	-	-
Piutang Lainnya	-	-	-
Penyisihan Piutang	-	-	-
Beban Dibayar Dimuka	-	-	-
Persediaan	-	-	-
Jumlah	527.592.800,00	151.894.285,00	375.698.515,00
INVESTASI JANGKA PANJANG			
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	-	-	-
Investasi Jangka Panjang Permanen	-	-	-
Jumlah	-	-	-
ASET TETAP			
Tanah	-	-	-
Peralatan dan Mesin	2.944.239.920,00	3.187.941.171,00	(243.701.251,00)
Gedung dan Bangunan	-	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-
Akumulasi Penyusutan	(2.422.041.705,00)	(2.270.543.079,00)	(151.498.626,00)
Jumlah	522.198.215,00	917.398.092,00	(395.199.877,00)
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan	-	-	-
Jumlah	-	-	-
ASET LAINNYA			
Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-
Aset Tidak Berwujud	-	-	-
Aset Lain-Lain	-	2.268.333,34	(2.268.333,34)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	-	-
Jumlah	-	2.268.333,34	(2.268.333,34)
JUMLAH ASET	1.049.791.015,00	1.071.560.710,34	(21.769.695,34)
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-	-
Utang Bunga	-	-	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	-	-	-
Utang Beban	-	130.000.000,00	(130.000.000,00)
Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-	-
Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	-	1.427.311.336,00	(1.427.311.336,00)
Jumlah	-	1.557.311.336,00	(1.557.311.336,00)
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Dalam Negeri	-	-	-
Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-
Jumlah	-	-	-
EKUITAS			
Ekuitas	1.049.791.015,00	(485.750.625,66)	1.535.541.640,66
Jumlah	1.049.791.015,00	(485.750.625,66)	1.535.541.640,66
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.049.791.015,00	1.071.560.710,34	(43.539.390,68)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan komponen laporan keuangan yang menjelaskan berbagai kebijakan akuntansi dan penjelasan atas pos-pos laporan keuangan yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Neraca serta berbagai informasi tambahan yang bersifat keuangan maupun non keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan ini juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari komponen laporan keuangan lainnya yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Neraca.

Informasi yang disajikan dalam keempat laporan tersebut harus secara bersama-sama dengan informasi yang disajikan dalam Catatan atas laporan keuangan.

I.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Biro Protokol dan Komunikasi Publik Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah disusun dan disediakan sebagai sarana informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Biro Protokol dan Komunikasi selama satu periode pelaporan.

Laporan Keuangan Biro Protokol dan Komunikasi digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Biro Protokol dan Komunikasi Publik dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan Biro Protokol dan Komunikasi menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik, dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber dananya ekonomis dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

- b. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber dananya ekonomis yang digunakan dalam kegiatan Biro Protokol dan Komunikasi serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- c. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Biro Protokol dan Komunikasi mendanai seluruh kegiatannya dalam mencukupi kebutuhan kasnya.
- d. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan dan kondisi Biro Protokol dan Komunikasi apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

I.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Biro Protokol dan Komunikasi Semester Pertama Tahun Anggaran 2017 ini disusun dengan berpedoman pada ketentuan yang termuat dalam:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan terakhir atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 06 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2018;

I.3 SISTEMATIKA PENULISAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II Biro Protokol dan Komunikasi, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN REALISASI APBD

- 2.1. Biro Protokol dan Komunikasi
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Realisasi APBD

Bab III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1. Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos-pos Pelaporan Keuangan
 - 5.1.1 Pendapatan - LRA
 - a. Pendapatan Asli Daerah
 - 5.1.2 Belanja
 - a. Belanja Pegawai
 - b. Belanja Barang dan Jasa
 - c. Belanja Modal
 - 5.1.3 Pendapatan – LO
 - a. Pendapatan Asli Daerah
 - 5.1.4 Beban
 - a. Beban Pegawai
 - b. Beban Barang dan Jasa
 - 5.1.5 Aset
 - a. Aset Lancar
 - b. Aset Tetap
 - c. Aset Lain-lain
 - 5.1.6 Kewajiban
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
 - 5.1.7 Ekuitas

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII PENUTUP

BAB II

BIRO PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PUBLIK, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN REALISASI APBD BIRO PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PUBLIK

II.1 BIRO PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PUBLIK

A. KEDUDUKAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85), Biro Protokol dan Komunikasi Publik merupakan salah satu unsur staf yang berada di bawah Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan dan dipimpin oleh seorang Kepala Biro dengan Eselon II.b.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Biro Protokol dan Komunikasi Publik mempunyai tugas tugas membina, mengkoordinasikan dan mengembangkan keprotokolan, penatausahaan administrasi serta komunikasi publik guna pemantapan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Biro Protokol dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain di bidang keprotokolan;
- b. penyiapan dan pelaksanaan serta pengaturan agenda dan kegiatan pimpinan;

- c. pelaksanaan acara penerimaan kunjungan tamu VIP, VVIP dan/atau tamu pemerintah daerah lainnya serta tokoh masyarakat tertentu yang memiliki tata kehormatan dan kedudukan protokoler;
- d. pelaksanaan pelayanan keprotokolan kepada instansi pemerintah/non pemerintah yang membutuhkan;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Biro.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Pasal 144 Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Biro Protokol dan Komunikasi Publik mempunyai susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Biro
2. Kepala Bagian Protokol, membawahi:
 - a) Kepala Sub Bagian Undangan;
 - b) Kepala Sub Bagian Pelayanan Tamu; dan
 - c) Kepala Sub Bagian Acara.
3. Kepala Bagian Penatalaksanaan Upacara dan Kerjasama Media, membawahi:
 - a) Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - b) Kepala Sub Bagian Upacara; dan
 - c) Kepala Sub Bagian Kerjasama Media.
4. Kepala Bagian Kepala Bagian Penyaringan Informasi dan Publikasi membawahi:
 - a) Kepala Sub Bagian Informasi Pemerintahan dan Umum;
 - b) Kepala Sub Bagian Informasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat; dan
 - c) Kepala Sub Bagian Media dan Dokumentasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Biro Protokol dan Komunikasi Publik didukung personil sebanyak 50 orang yang terdiri dari 27 orang laki – laki dan 23 orang perempuan. Berdasarkan golongan/pangkat, pegawai Biro Protokol dan Komunikasi Publik dapat dikelompokkan sebagai berikut:

TABEL 2.1.
REKAPITULASI PNS BIRO PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PUBLIK
PER 30 JUNI 2018
BERDASARKAN GOLONGAN/PANGKAT

Nomor	Golongan/Pangkat	Jumlah (Orang)
1.	Golongan IV/c	
2.	Golongan IV/b	3
3.	Golongan IV/a	1
4.	Golongan III/d	5
5.	Golongan III/c	9
6.	Golongan III/b	10
7.	Golongan III/a	7
8.	Golongan II/d	4
9.	Golongan II/c	3
10.	Golongan II/b	5
11.	Golongan II/a	2
12.	Golongan I/d	-
13.	Golongan I/c	-
14.	Golongan I/b	-
15.	Golongan I/a	-
Total		49

Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan formal, pegawai Biro Protokol dan Komunikasi Publik dapat dikelompokkan sebagai berikut:

TABEL 2.2.
REKAPITULASI PNS BIRO PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PUBLIK
PER 30 JUNI 2018
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN FORMAL

Nomor	Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	S3	0
2.	S2	5
3.	S1	23
4.	D4	4
5.	D3	3
6.	D2	0
7.	D1	0
8.	SMA/Sederajat	12
9.	SMP/Sederajat	1
10.	SD	1
Total		49

D. LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH

Lingkungan strategis yang berpengaruh dibidang tugas Biro Protokol dan Komunikasi Publik antara lain yaitu:

1. Adanya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah memberikan ketegasan tentang tugas pokok dan fungsi serta pelaksanaan program/ kegiatan Biro Protokol dan Komunikasi Publik Setda Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Jumlah sumber daya manusia yang cukup besar.
3. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai sehingga mendukung penyelesaian pelaksanaan tugas.
4. Dinamika Pembangunan di Kalimantan Tengah meningkatkan peran dan posisi tawar Kalimantan Tengah khususnya Kepala Daerah sehingga pelayanan terhadap tamu-tamu daerah dituntut untuk lebih baik.

E. VISI DAN MISI

1. VISI

Visi Biro Protokol dan Komunikasi Publik Setda Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2021 adalah "Terwujudnya insan kehumasan dan keprotokolan yang handal, professional, terbuka, tanggap, dan bertanggungjawab, dalam mewujudkan Pemerintah yang bersih, dan berwibawa."

2. MISI

Untuk pelaksanaan lebih lanjut dari Visi yang ada tersebut, Biro Protokol dan Komunikasi Publik Setda Provinsi Kalimantan Tengah berupaya untuk menetapkan Misi-nya sebagai berikut:

1. Membina hubungan yang sinergis dan harmonis dengan lembaga-lembaga terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Protokol dan Komunikasi Publik Setda Prov. Kalimantan Tengah.
2. Mengembangkan citra Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui pelayanan standar, tanggap, terbuka, manusiawi dan bertanggung jawab mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik.
3. Mengkoordinasikan penyampaian informasi kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk menjamin validitas dan atau akurasi informasi kepada publik.
4. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan aparat kehumasan dan keprotokolan sesuai tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang komunikasi dan informatika.
5. Menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang kondusif melalui produk-produk kehumasan yang humanis.

F. TUJUAN RENSTRA DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Biro Protokol dan Komunikasi Publik Setda Provinsi Kalimantan Tengah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk mencapai visi dan misi yaitu :

Tujuan :

" Terciptanya komunikasi dan pengembangan kehumasan dalam rangka pelayanan publik terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai upaya mewujudkan Pemerintah yang bersih, professional dan responsif."

Sasaran :

- a. Meningkatnya arus informasi kepada masyarakat tentang kegiatan pembangunan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui media massa, baik media cetak maupun elektronik.

- b. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pembangunan daerah, sehingga diharapkan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.
- c. Meningkatnya kecepatan peliputan pemberitaan kebijakan daerah kepada publik.
- d. Terbina dan berkembangnya media massa, sehingga diharapkan benar-benar mampu memberikan penerangan serta dapat pula menyalurkan aspirasi masyarakat dalam menuju pers yang sehat, bebas, bertanggungjawab dan dapat berperan sebagai sarana social kontrol.
- e. Terbentuknya citra pemerintahan yang baik (Good Governance), melalui penyampaian informasi kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam upaya penegakan disiplin dan pemberantasan KKN di lingkungan aparatur.
- f. Terselenggaranya dokumentasi kegiatan-kegiatan pokok Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- g. Meningkatnya saran dan prasarana penunjang operasional Kehumasan.

II.2 KEBIJAKAN KEUANGAN

Dasar hukum kebijakan anggaran Pemerintah Daerah adalah Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2017 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang

terintegrasi, diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Penyusunan APBD sebagaimana ketentuan peraturan perundangan secara tegas menyatakan bahwa APBD disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang hendak dicapai, walaupun secara implisit tidak dinyatakan bahwa APBD disusun dengan pendekatan kinerja berdasarkan fungsi dan urusan SKPD. Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

1) Pendapatan Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dikenal dua istilah pendapatan, yaitu Pendapatan-LRA dan Pendapatan LO. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara/daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak, dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan Pendapatan-LO adalah hak yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada tiga kelompok pendapatan daerah, yaitu:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang Sah

b. Pendapatan Transfer

1. Bagi Hasil DAU/DAK/Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
2. Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya
3. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
4. Bantuan Keuangan

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. Pendapatan Hibah

2. Dana Darurat
 3. Pendapatan Lainnya
- 2) Belanja Daerah

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Realisasi Anggaran menyebut belanja sedangkan Laporan Operasional menyebut dengan beban. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Klasifikasi belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut:

a. Belanja Operasi

1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang dan Jasa
3. Belanja Bunga
4. Belanja Subsidi
5. Belanja Hibah
6. Bantuan Sosial

b. Belanja Modal

1. Belanja Modal Tanah
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
5. Belanja Aset Tetap Lainnya
6. Belanja Aset Lainnya

c. Belanja Tak Terduga

3) Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan

dan dana bagi hasil. Transfer masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi. Transfer keluar (LRA) adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah serta bantuan keuangan.

4) Pembiayaan

Ada dua jenis pembiayaan yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

II.3. REALISASI APBD BIRO PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Anggaran Pendapatan Biro Protokol dan Komunikasi Publik tahun 2018 sebesar Rp0,00 dan Belanja Biro Protokol dan Komunikasi Publik tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp 8.771.000.000,00 yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp 8.495.477.100,00 dan belanja modal sebesar Rp 275.522.900,00.

Realisasi pendapatan Biro Protokol dan Komunikasi Publik semester pertama tahun 2017 adalah sebesar Rp 0,00, sedangkan realisasi belanja sebesar Rp1.489.763.438,00 yang terdiri atas realisasi belanja operasi sebesar Rp1.489.763.438,00 dan belanja modal sebesar Rp0,00.

BAB III

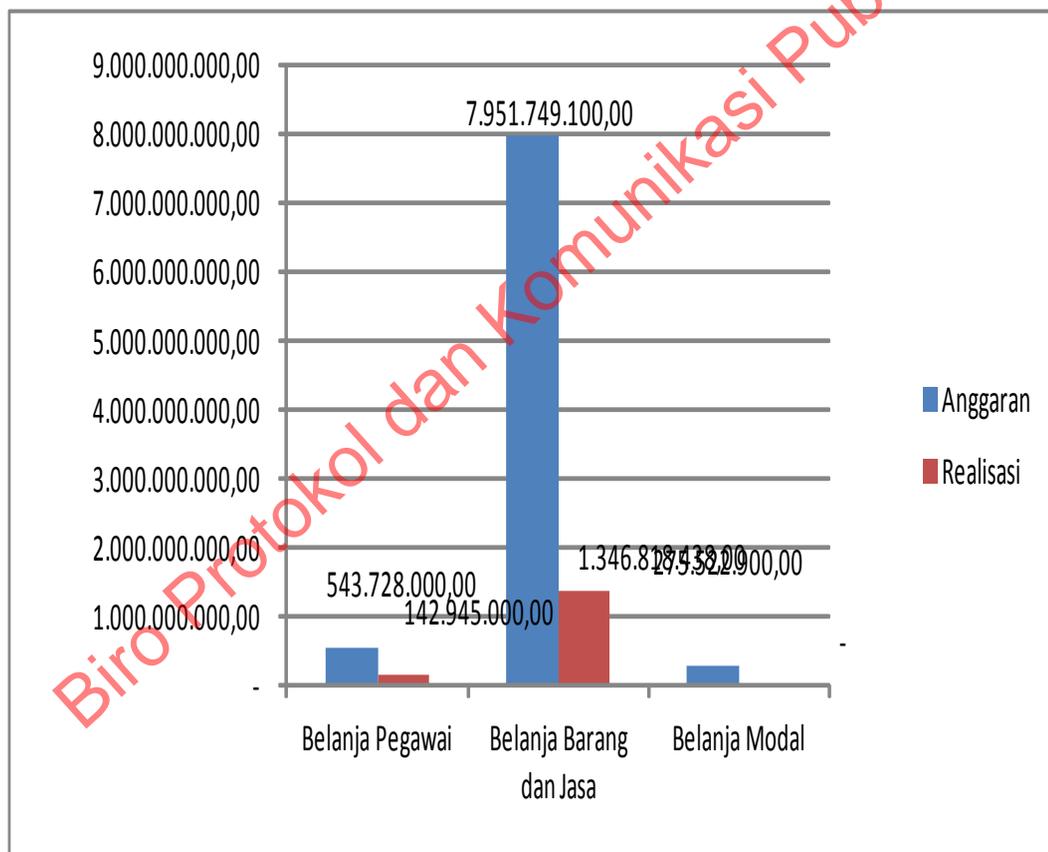
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Pada bagian ini akan disajikan analisa capaian kinerja keuangan yang digambarkan dalam ringkasan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Biro Protokol dan Komunikasi Publik secara keseluruhan sebagai akuntabilitas keuangan terhadap capaian indikator dalam mewujudkan tujuan yang ditetapkan.

Dari gambaran realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semester Pertama Tahun Anggaran 2018 Biro Protokol dan Komunikasi Publik dapat dijelaskan sebagai berikut:

III.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

(dalam rupiah)



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

IV.1. ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Tujuan entitas pelaporan keuangan untuk menunjukkan entitas akuntansi pada pusat-pusat pertanggungjawaban keuangan daerah.

Entitas pelaporan keuangan mengacu pada konsep bahwa setiap pusat pertanggungjawaban harus bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Entitas pelaporan keuangan adalah Biro Protokol dan Komunikasi Publik Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

IV.2. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Basis akuntansi disusun berpedoman pada Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Berikut ini disajikan delapan prinsip yang digunakan dalam pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu :

1. Basis akuntansi (*accounting basis*);

- a. **Basis akuntansi** yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah yaitu transaksi dan kejadian diakui atas akrual.
- b. **Transaksi penerimaan kas** atau pengeluaran kas dibukukan pada saat uang diterima atau dibayar (dasar kas). Pada akhir periode dilakukan penyesuaian untuk mengakui transaksi dan kejadian dalam periode berjalan meskipun penerimaan atau pengeluaran kas dari transaksi dan kejadian dimaksud belum terealisasi.
- c. **Basis Kas untuk Laporan Perhitungan APBD** (Laporan Realisasi Anggaran) berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh Kas Daerah, dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Kas Daerah. Entitas Pemerintah Daerah tidak menggunakan istilah laba/rugi. Penentuan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan realisasi pembiayaan dengan seluruh belanja yang telah dibayar.

Sementara itu, pendapatan dan beban selain kas seperti bantuan, hibah dan sumbangan dalam bentuk barang dan jasa hanya disajikan sebagai informasi tambahan pada Laporan Perhitungan APBD (Laporan Realisasi Anggaran).

- d. **Basis Akrual Untuk Neraca** berarti bahwa aktiva, utang, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada posisi keuangan Pemerintah Daerah, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

2. Prinsip nilai perolehan (*historical cost principle*);

- a. Aktiva dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aktiva tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk melunasi utang di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah.
- b. Nilai perolehan lebih handal dibandingkan penilaian yang lain karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi.

3. Prinsip realisasi (*realization principle*);

- a. Pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja yang terjadi dalam periode tersebut.
- b. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi Pemerintah Daerah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.

4. Prinsip substansi mengungguli formalitas (*substance over form principle*);

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitas.

5. Prinsip periodisitas (*periodicity principle*);

- a. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas Pemerintah Daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.
- b. Periode pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan.

6. Prinsip konsistensi (*consistency principle*);

- a. Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.

- b. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam laporan keuangan.

7. Prinsip pengungkapan lengkap (*full disclosure principle*);

Laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas laporan keuangan.

8. Prinsip penyajian wajar (*fair presentation principle*).

- a. Laporan keuangan harus menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu entitas.
- b. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aktiva atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan utang tidak dinyatakan terlalu rendah.

IV.3. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Informasi Kebijakan Akun Neraca Daerah yang penting disajikan adalah :

1. Periode Akuntansi

Periode akuntansi yang digunakan adalah 1 Januari 2017 s/d 30 Juni 2016.

2. Pos-Pos Neraca

Kebijakan pos-pos neraca menjelaskan tentang perlakuan akuntansi atas akun neraca. Akun neraca secara garis besar terdiri atas:

- a. Aset
- b. Kewajiban
- c. Ekuitas

A. ASET

Tujuan kebijakan akuntansi aset adalah mengatur perlakuan akuntansi aset. Aset adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dengan

satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan untuk pemeliharaan sumber-sumber daya karena alasan sejarah dan budaya. Jumlah aktiva tetap pada neraca dilakukan dengan menjumlahkan semua belanja modal baik yang berasal dari belanja modal aparatur maupun publik.

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lain-lain.

1) ASET LANCAR

Aset lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi. Aset lancar terdiri atas :

1.1. Kas di Kas Daerah

1.1.1. Kas adalah alat pembayaran sah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah.

Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang berada di rekening Kas Daerah pada bank-bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

1.1.2. Kas dinyatakan dalam nilai rupiah, apabila terdapat kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

1.1.3. Pada akhir tahun, kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran

Adalah dana yang masih tersisa dalam tahun anggaran berjalan dan belum dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran sampai dengan berakhirnya tahun anggaran tersebut.

1.2.1 Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat pada tahun berikutnya berdasarkan *stock opname*.

1.2.2 Kas di Bendahara Pengeluaran dinilai dalam neraca berdasarkan jumlah hasil *stock opname*.

2) PIUTANG

2.1 Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi.

2.2 Piutang terdiri atas : bagian lancar tagihan penjualan angsuran, piutang pajak, piutang retribusi, dan piutang lain-lain.

2.3 Piutang yang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan yang

telah diakui dalam periode berjalan.

- 2.4 Piutang dinilai sebesar nilai bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan.
- 2.5 Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan piutang dicatat atas laporan keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan, antara lain :
 - Klarifikasi piutang menurut umur
 - Klarifikasi piutang menurut debitur

3) PERSEDIAAN BARANG PAKAI HABIS / MATERIAL

- 3.1 Persediaan Barang Pakai Habis / Material adalah barang yang dipakai habis dalam satu periode akuntansi.
- 3.2 Persediaan Barang Pakai Habis / Material terdiri atas perlengkapan alat tulis kantor, perlengkapan benda pos, perlengkapan alat kebersihan, Perlengkapan pegawai, perlengkapan bahan laboratorium, perlengkapan ban, aki, dan suku cadang kendaraan / alat-alat berat, perlengkapan perkakas kerja, dsb.
- 3.3 Persediaan Barang Pakai Habis / Material diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai.
- 3.4 Persediaan Barang Pakai Habis / Material diukur berdasarkan hasil inventarisasi fisik barang yang belum terpakai.
- 3.5 Persediaan Barang Pakai Habis / Material dinilai berdasarkan :
 - Harga pembelian terakhir jika diperoleh dengan pembelian.
 - Harga standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri.
 - Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualan jika diperoleh dengan cara lain seperti donasi.
- 3.6 Hal-hal yang perlu diungkapkan yang berkaitan dengan Persediaan Barang Pakai Habis / Material dicatat atas laporan keuangan antara lain rincian/klarifikasi barang dan jumlah masing-masing klarifikasi.

4) INVESTASI JANGKA PANJANG

- 4.1 Investasi jangka panjang adalah penyertaan modal yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.
- 4.2 Investasi jangka panjang antara lain terdiri atas:
 - a. Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

- b. Investasi jangka panjang lainnya yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.
- 4.3 Investasi jangka panjang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan harga perolehan yaitu jumlah kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.
- 4.4 Penghasilan dari investasi saham diakui apabila Pemerintah Daerah menerima deviden dan/atau bunga dari perusahaan yang diinvestasikan (*investee*) pada periode berjalan dan dicatat sebagai pendapatan.
- 4.5 Harga perolehan investasi jangka panjang dalam valuta asing harus dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal transaksi. Saldo pada tanggal neraca harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal tersebut.
- 4.6 Investasi jangka panjang yang diukur dengan valuta asing harus dikonversi ke mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) yang berlaku pada tanggal neraca.
- 4.7 Investasi dalam saham yang dijual/ditukar dengan aktiva yang lain, nilai sahamnya ditetapkan dengan menggunakan metode penilaian harga perolehan, atau harga pasar yang mana lebih rendah (Lower Cost or Market).

5) ASET TETAP

- 5.1 Aset tetap adalah aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik dan nilainya material.
- 5.2 Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, donasi dan pertukaran dengan aset lainnya.
- 5.3 Aset tetap antara lain terdiri dari :
- Tanah
 - Jalan dan Jembatan
 - Bangunan Air (irigasi)
 - Instalasi
 - Jaringan

- Bangunan Gedung
- Bangunan Monumen
- Alat-Alat Besar
- Alat Angkutan
- Alat Bengkel dan Alat Ukur
- Alat Pertanian
- Alat-Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga
- Alat Studio dan Alat Komunikasi
- Alat-Alat Kedokteran
- Alat-Alat Laboratorium
- Buku dan Perpustakaan
- Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan
- Hewan Ternak dan Tumbuhan
- Alat Keamanan

5.4 Penjelasan Akun Aset Tetap

a. Tanah

Tanah meliputi tanah kantor, tanah sarana kesehatan, tanah sarana pendidikan, tanah rumah dinas, tanah sarana olahraga, tanah sarana sosial, tanah terminal, angkutan darat, tanah angkutan laut, tanah waduk, tanah saluran air, tanah jalan, tanah dermaga dan lain-lain sejenisnya.

b. Jalan dan Jembatan

Jalan dan Jembatan meliputi jalan, jembatan, terowongan dan lain-lain sejenisnya.

c. Bangunan Air (Irigasi)

Bangunan Air meliputi waduk, pintu air, saluran air dan lain-lain sejenisnya.

d. Instalasi

Instalasi meliputi instalasi pengolahan sampah, instalasi pengolahan air kotor, instalasi pengolahan bahan bangunan dan lain-lain sejenisnya.

e. Jaringan

Jaringan meliputi jaringan air minum, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas dan lain-lain sejenisnya.

f. Bangunan Gedung

Bangunan Gedung meliputi gedung kantor, gedung sarana kesehatan, gedung sarana pendidikan, gedung rumah dinas, gedung sarana olahraga, gedung sarana tempat ibadah, gedung sarana sosial dan lain-lain sejenisnya.

- g. Bangunan Monumen
Bangunan Monumen meliputi bangunan bersejarah, bangunan tugu peringatan, bangunan tugu titik kontrol dan lain-lain sejenisnya.
- h. Alat-alat Besar
Alat-alat Besar meliputi alat-alat besar darat, alat-alat besar apung, alat-alat bantu dan lain-lain sejenisnya.
- i. Alat-alat Angkutan
Alat Angkutan meliputi alat angkutan darat bermotor, alat angkutan darat tidak bermotor, alat angkutan apung bermotor, alat angkutan apung tidak bermotor dan lain-lain sejenisnya.
- j. Alat Bengkel dan Alat Ukur
Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur meliputi alat bengkel bermesin, alat bengkel tidak bermesin, alat ukur dan lain-lain sejenisnya.
- k. Alat Pertanian
Alat Pertanian meliputi alat pengolahan, alat pemeliharaan/panen penyimpanan dan lain-lain sejenisnya.
- l. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga
Alat-alat kantor dan Rumah Tangga meliputi alat kantor, alat rumah tangga, komputer, meja kursi kerja dan lain-lain sejenisnya.
- m. Alat Studio dan Alat Komunikasi
Alat Studio dan Alat Komunikasi meliputi alat studio, alat komunikasi, peralatan pemancar dan lain-lain sejenisnya.
- n. Alat-alat Kedokteran
Alat-alat kedokteran meliputi alat kedokteran umum, alat kedokteran gigi, alat kedokteran KB, alat kedokteran mata, alat kedokteran THT, alat rontgen, alat farmasi, alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan, alat kedokteran bagian penyakit dalam dan lain-lain sejenisnya.
- o. Alat-alat Laboratorium
Alat-alat laboratorium meliputi unit-unit laboratorium, alat laboratorium mikrobiologi, alat laboratorium hidrokimia, alat laboratorium buatan dan lain-lain sejenisnya.
- p. Buku dan Perpustakaan
Buku dan Perpustakaan meliputi buku, terbitan berkala, barang-barang perpustakaan dan lain-lain sejenisnya.

- q. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan meliputi barang bercorak kebudayaan, alat olahraga lainnya dan lain-lain sejenisnya.
- r. Hewan/Ternak dan Tumbuhan
Hewan/Ternak dan Tumbuhan meliputi hewan, tanaman dan lain-lain sejenisnya.
- s. Alat Keamanan
Alat Keamanan meliputi alat keamanan dan lain-lain sejenisnya.

5.4.1 Pengakuan

- Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal yang telah diakui dalam periode berkenaan.
- Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berkenaan yaitu pada saat aktiva tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
- Transaksi dan kejadian setelah perolehan aktiva tetap meliputi pemeliharaan (maintenance), perbaikan (repairs), penambahan (additions), pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.

Pemeliharaan (maintenance) adalah hal-hal yang dilakukan untuk memperoleh kondisi kerja (operasi) yang baik dari sebuah aset tetap (misalnya pemeliharaan rutin, secara periodik) dan sifatnya rutin. Pemeliharaan ini tidak memperbaiki atau menambah umur ekonomis aktiva. Biaya pemeliharaan diakui langsung sebagai beban pada periode berjalan dan dicatat pada rekening Biaya Pemeliharaan.

Penambahan adalah peningkatan nilai aset karena diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan akan dikapitalisasi dan ditambah pada harga perolehan aktiva tetap yang bersangkutan.

Pengurangan adalah penurunan nilai aset tetap karena berkurangnya kuantitas. Pengurangan aktiva tetap dicatat sebagai pengurangan harga perolehan aktiva tetap yang bersangkutan.

Pengembangan adalah peningkatan nilai aktiva tetap karena meningkatnya manfaat aktiva tetap. Pengembangan aktiva tetap diharapkan akan: (1) memperpanjang usia manfaat,

(2) meningkatkan efisiensi dan produktivitas dan atau menurunkan biaya pengoperasian sebuah aset tetap. Biaya pengembangan akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan aset tetap.

Penggantian utama (replacements) adalah memperbaharui bagian utama aktiva tetap dan tidak bersifat rutin. Biaya penggantian utama akan dikapitalisasi dengan cara pengurangan nilai bagian yang diganti dari harga aset yang semula dan menambah biaya penggantian pada harga aset.

5.4.2 Pengukuran

- Aset tetap yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.
- Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan biaya penimbunan. Nilai tanah termasuk juga harga pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sesuatu yang baru jika bangunan tua itu dimaksudkan untuk dibongkar.
- Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan dan jembatan sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah untuk pembangunan jalan) sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap digunakan.
- Instalasi dan jaringan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi dan jaringan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan instalasi dan jaringan tersebut siap untuk digunakan.
- Bangunan air (irigasi) diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun irigasi sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan irigasi tersebut siap untuk digunakan.

- Bangunan gedung diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli, biaya pembebasan tanah, biaya pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), notaris dan pajak.
- Bangunan Monumen diukur berdasarkan revaluasi terhadap bangunan monumen bersangkutan.
- Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak selain dari kontraktor. Biaya ini juga mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola, jika ada.
- Alat-alat ukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- Alat bengkel dan alat ukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- Alat pertanian diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- Alat-alat angkutan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kendaraan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- Alat kantor dan rumah tangga diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan

siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.

- Alat studio dan alat komunikasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- Alat-alat kedokteran diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- Alat Laboratorium diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- Buku Perpustakaan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan.
- Barang Bercorak kesenian/kebudayaan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- Hewan/ ternak dan tumbuhan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan.
- Alat keamanan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan.

5.4.3 Penilaian

Aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian aset tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasi.

5.4.4 Pengungkapan

- Hal-hal yang perlu dilakukan pengungkapan (*disclosure*) dalam pelaporan aset tetap antara lain mengenai penilaian, penyusutan (depresiasi) pelepasan, penghapusan, dan perubahan nilai aktiva tetap.
- Pengungkapan nilai aset tetap menjelaskan harga dasar yang digunakan dalam penilaian aktiva tetap.

6) **DANA CADANGAN**

- 6.1 Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi.
- 6.2 Dana cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan transfer dari dana cadangan atau jumlah pembiayaan yang berupa pengeluaran transfer ke dana cadangan.
- 6.3 Hal-hal yang perlu diungkapkan yang berkaitan dengan Dana Cadangan antara lain klarifikasi Dana Cadangan berdasarkan tujuan pembentukan.

7) **ASET LAIN-LAIN**

Aset lain-lain adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, aset tetap dan dana cadangan. Aset lain-lain terdiri dari :

- 7.1. **Tagihan Penjualan Angsuran** menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan rumah dan kendaraan dari tagihan penjualan angsuran lainnya.

- 7.2. **Built Operate Transfer (BOT), Built Transfer Operate (BTO) dan Kerjasama Operasi (KSO) dan Penjelasan**

Adalah pemanfaatan barang/kekayaan milik negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara pihak tersebut membangun sarana beserta fasilitas diatas tanah tersebut, kemudian menyerahkan tanah, bangunan, atau sarana lain berikut fasilitas yang telah dibangunnya untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu dan akan diserahkan kembali kepada daerah setelah berakhirnya waktu yang telah disepakati.

Pengakuan atas Built Operate Transfer (BOT), Built Transfer Operate (BTO) Dan Kerjasama Operasi (KSO) berdasarkan harga perolehan pada saat bangunan atau aktiva lainnya tersebut dibangun, Biaya pembangunan yang tercantum di perjanjian

Kerjasama Operasi (KSO) atau sebesar nilai wajar yang paling obyektif atau berdaya uji.

7.3. **Konstruksi Dalam Pengerjaan** adalah bangunan yang sampai dengan akhir periode akuntansi belum selesai pengerjaannya sehingga belum dapat digunakan.

Bangunan dalam pekerjaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah akumulasi biaya sampai dengan akhir periode akuntansi.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan bangunan dalam pekerjaan adalah tujuan peruntukan bangunan, unit penanggungjawab bangunan dan hal-hal lain yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Lain-Lain Aktiva adalah aktiva di luar tagihan penjualan angsuran, dan kemitraan dengan pihak ketiga.

B. KEWAJIBAN

Tujuan kebijakan akuntansi utang adalah mengatur perlakuan akuntansi utang. Perlakuan akuntansi utang mencakup defenisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapan utang.

Kewajiban adalah utang kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu. Kewajiban dikelompokkan menjadi Kewajiban jangka pendek dan Kewajiban jangka panjang.

1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

a. Kewajiban Jangka Pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Kewajiban jangka pendek antara lain terdiri dari bagian lancar utang jangka panjang dan utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK) Kewajiban Jangka Pendek terdiri atas :

- 1) **Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang jatuh tempo** merupakan sebagian dari utang pokok jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
- 2) **Utang Biaya Pinjaman** merupakan utang yang terjadi sebagai ikutan utang pokok, yang berupa bunga, denda dan *commitmen fee/Commitmen Charge*. Bunga adalah beban bunga yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah kepada Lender karena telah menarik pinjaman dengan tarif suku bunga tertentu, dimana Pemda tidak dapat melunasi angsuran pokok utang maupun bunganya dengan prosentase tertentu sesuai perjanjian pinjaman yang telah disepakati kedua belah pihak.

Comitment Fee adalah utang yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah sebesar prosentase tertentu karena tidak ditariknya pinjaman yang telah disepakati dalam perjanjian pinjaman.

- 3) **Utang Jangka Pendek Lainnya** adalah utang jangka pendek yang tidak dapat dikelompokkan pada perkiraan tersebut diatas.
- b. Kewajiban jangka pendek dilakukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing (valas) dikonversi ke rupiah berdasarkan nilai tukar pada tanggal transaksi.
- c. Kewajiban jangka pendek dicatat pada saat timbulnya utang tersebut yaitu jika sudah ada ketetapannya.

2. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Kewajiban Jangka Panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari:

- a. **Utang Jangka Panjang** merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Utang jangka panjang dapat berasal dari pinjaman dalam negeri maupun dari luar negeri. Utang (pinjaman) jangka panjang hanya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aktiva Daerah dan dapat menghasilkan penerimaan (baik langsung maupun tidak langsung) untuk pembayaran pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat.
- b. **Utang Bunga** merupakan utang kepada kreditur atas pinjaman jangka panjang yang harus dibayar kembali/jatuh tempo lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Utang jangka panjang diakui pada saat dana tersebut diterima dan dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing (valas) di konversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (Kurs Tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi.
- c. **Utang Belanja** merupakan utang yang berasal dari belanja yang sudah di bebaskan tetapi belum dilakukan pembayaran sehingga masih merupakan kewajiban.
- d. **Utang Pajak** merupakan utang yang berasal dari pajak yang belum dibayar. Utang Pajak timbul karena sampai dengan akhir tahun pajak yang telah dipungut oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah namun belum disetorkan ke KPKN.

- e. **Pendapatan Diterima di Muka** merupakan utang pihak ketiga yang berasal dari setoran kelebihan pembayaran uang muka. Rekening Pendapatan Diterima di Muka muncul karena sampai dengan akhir tahun ada jenis pendapatan yang belum direalisasi sampai namun telah dilakukan penerimaan kas, sehingga pada akhir periode akuntansi perlu dicatat berapa jumlah yang belum direalisasi menjadi pendapatan
- f. **Utang Lain-lain** merupakan utang lancar yang tidak dapat diklasifikasikan pada jenis-jenis rekening utang.

C. EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

IV.4. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH

Dalam penyajian Catatan atas Laporan Keuangan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada karakteristik kualitatif laporan keuangan yang merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diungkapkan dalam penyajian informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Keempat karakteristik tersebut adalah :

1. Relevan
2. Andal
3. Dapat dibandingkan dan
4. Dapat dipahami

Penjelasan terhadap akun-akun neraca hanya mencakup transaksi yang terjadi pada pos-pos perkiraan neraca yang bersangkutan. Diharapkan dari kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyajian Laporan Keuangan khususnya Neraca Daerah ini dapat memudahkan pemahaman dan sekaligus memberikan informasi menyangkut Laporan Keuangan BIRO PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PUBLIK kepada para pemakai/stakeholders.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

V.1. RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

Bertitik tolak pada arti dan ruang lingkup keuangan daerah, maka dikemukakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk juga di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selanjutnya sesuai struktur APBD Biro Protokol dan Komunikasi Publik berikut disajikan uraian tentang realisasi Pendapatan-LRA, Belanja, Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban, Ekuitas sebagai berikut:

V.1.1. PENDAPATAN-LRA

Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA:

Realisasi penerimaan retribusi sampai Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 0,00,- atau 0%. Hal ini dikarenakan tidak adanya pendapatan yang dianggarkan pada Biro Protokol dan Komunikasi Publik pada Tahun 2018.

V.1.2. BELANJA

Realisasi belanja Biro Protokol dan Komunikasi Publik Semester Pertama Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp1.489.763.438,00 atau sekitar 16.99% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp8.771.000.000,00. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2017, belanja Semester Pertama Tahun Anggaran 2018 lebih tinggi Rp 712.452.102,00 atau 91,66%. Realisasi belanja Biro Protokol dan Komunikasi Publik sebesar Rp 1.489.763.438,00 dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu belanja operasi sebesar Rp 1.489.452.438,00 dan belanja modal sebesar Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.
Realisasi Belanja Semester Pertama Tahun Anggaran 2018

No.	Uraian	Semester Pertama TA 2018			Semester Pertama TA 2017	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)		
	Belanja Operasi	8.495.477.100,00	96,86%	1.489.763.438,00	777.311.336,00	712.452.102,00
1.	Belanja Pegawai	543.728.000,00	6,20%	142.945.000,00	139.565.000,00	3.380.000,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	7.951.749.100,00	90,66%	1.346.818.438,00	637.746.336,00	709.072.102,00
	Belanja Modal		0,00%			
1	Belanja Modal	275.522.900,00	3,14%	-	144.303.000,00	(144.303.000,00)
	Jumlah	8.771.000.000,00	100,00%	1.489.763.438,00	921.614.336,00	568.149.102,00

a. Belanja Pegawai Rp142.945.000,00

Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp543.728.000,00 atau 6,2% dari total anggaran Biro Protokol dan Komunikasi Publik. Sampai semester pertama Tahun Anggaran 2018 telah terealisasi sebesar Rp142.945.000,00 atau 26,69% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp368.328.000,00 atau 73,31%. Sedangkan realisasi semester pertama tahun 2017 sebesar Rp139.565.000,00. Rincian realisasi belanja pegawai adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.
Rincian Realisasi Belanja Pegawai Semester Pertama TA 2018

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Realisasi Semester Pertama 2017
	Anggaran 2018	Realisasi Semester Pertama 2018	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai					
Belanja Honorarium PNS	175.400.000,00	0,00	175.400.000,00	-	0,00
Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	59.400.000,00	0,00	59.400.000,00	-	0,00
Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	22.400.000,00	0,00	22.400.000,00	-	0,00
Belanja Honorarium Pengelola Uang dan Barang	93.600.000,00	0,00	93.600.000,00	-	0,00
Belanja Honorarium Non-PNS	368.328.000,00	142.945.000,00	225.383.000,00	38,81	139.565.000,00
Belanja Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	368.328.000,00	142.945.000,00	225.383.000,00	38,81	139.565.000,00
Jumlah	543.728.000,00	142.945.000,00	400.783.000,00	26,29	139.565.000,00

1. Belanja Honorarium PNS Rp0,00

Belanja Gaji dan Tunjangan dianggarkan sebesar Rp175.400.000,00 dan semester pertama Tahun Anggaran 2018 belum terealisasi atau 0%. Sedangkan realisasi semester pertama tahun 2017 sebesar Rp0,00 Rincian obyek belanja gaji dan tunjangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.1. Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Rp 0.00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan dianggarkan Rp 59.400.000,00 dan realisasi per 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp 0.00 atau 0%.

1.2. Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa – Rp 0.00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa dianggarkan Rp 22.400.000,00 dan realisasi per 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp 0.00 atau 0 %.

1.3. Belanja Honorarium Pengelola Uang dan Barang Rp 0,00

Honorarium Pengelola Uang dan Barang dianggarkan Rp 93.600.000,00 dan realisasi per 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp 0.00 atau 0 %.

2. Belanja Honorarium Non PNS **Rp142.945.000,00**

Belanja Honorarium Non PNS dianggarkan sebesar Rp 368.328.000,00 dan sampai semester pertama Tahun Anggaran 2018 telah terealisasi sebesar Rp 142.945.000,00 atau 38,81%. Sedangkan realisasi semester pertama tahun 2017 Rp 139.565.000,00. Rincian obyek belanja honorarium non PNS dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Semester Pertama Tahun 2017			Semester Pertama Tahun 2018	Naik/Turun %
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	368.328.000,00	142.945.000,00	38,81	139.565.000,00	97,64
Jumlah	368.328.000,00	142.945.000,00	38,81	139.565.000,00	97,64

b. Belanja Barang dan Jasa **Rp 637.746.336,00**

Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp7.951.749.100 atau 90,66% dari total anggaran Biro Protokol dan Komunikasi Publik. Sampai dengan semester pertama Tahun Anggaran 2018 sudah terealisasi sebesar Rp1.346.818.438,00 atau 16,94% sehingga terdapat sisa anggaran Rp7.543.867.445,00 atau 83,06%. Sedangkan realisasi semester pertama tahun 2017 sebesar Rp637.746.336,00. Secara rinci realisasi Belanja Barang dan Jasa dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.4.
Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa Semester Pertama TA 2018

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Realisasi Semester Pertama 2017 (Rp)
	Anggaran 2018	Realisasi Semester Pertama 2018	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6
Belanja Operasi					
Belanja Barang dan Jasa					
Belanja Bahan Pakai Habis	389.974.200,00	118.442.500,00	(271.531.700,00)	30,37	44.450.000,00
Belanja Jasa Kantor	5.165.744.600,00	302.687.600,00	(4.863.057.000,00)	5,86	202.635.095,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	483.762.240,00	57.843.600,00	(425.918.640,00)	11,96	33.091.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	-	-	#DIV/0!	-
Belanja Makanan dan Minuman	32.000.000,00	4.000.000,00	(28.000.000,00)	12,50	3.400.000,00
Belanja Pakaian Khusus dan Hari - Hari Tertentu	35.750.000,00	35.750.000,00	-	100,00	-
Belanja Perjalanan Dinas	1.844.518.060,00	828.094.738,00	(1.016.423.322,00)	44,89	354.170.241,00
Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	-	-	-	#DIV/0!	-
Belanja Honorarium PNS	-	-	-	-	-
Belanja Honorarium Non PNS	-	-	-	-	-
Jumlah	7.951.749.100,00	1.346.818.438,00	(6.604.930.662,00)	16,94	637.746.336,00

1. Belanja Bahan Pakai Habis **Rp118.442.500,00**

Belanja Bahan Pakai Habis dianggarkan sebesar Rp389.974.200,00 dan sampai semester pertama Tahun Anggaran 2018 telah terealisasi sebesar Rp118.442.500 atau 30,37%. Sedangkan realisasi semester pertama tahun 2017 sebesar Rp44.450.000,00. Rincian obyek belanja pakai habis dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Semester Pertama Tahun 2017			Semester Pertama Tahun 2017	Naik/Turun %
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Alat Tulis Kantor	80.874.200,00	27.956.500,00	34,57	20.000.000,00	28,46
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	6.000.000,00	1.050.000,00	17,50	1.200.000,00	(14,29)
Belanja Dokumentasi	28.000.000,00	9.986.000,00	35,66	14.000.000,00	(40,20)
Belanja Baliho	275.100.000,00	79.450.000,00	28,88	9.250.000,00	88,36
Jumlah	389.974.200,00	118.442.500,00	30,37	44.450.000,00	62,47

2. Belanja Jasa Kantor **Rp302.687.600,00**

Belanja Jasa Kantor dianggarkan sebesar Rp5.165.744.600,00 dan sampai semester pertama Tahun Anggaran 2018 telah terealisasi sebesar Rp302.687.600,00 atau 5,86%. Sedangkan realisasi semester pertama tahun 2017 sebesar Rp202.635.095,00. Rincian obyek belanja jasa kantor dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Semester Pertama Tahun 2018			Semester Pertama Tahun 2017	Naik/Turun %
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Surat Kabar/Majalah	348.650.600,00	97.169.600,00	27,87	36.755.000,00	62,17
Belanja Kawat/Faksimili/Internet	20.000.000,00	1.573.000,00	7,87	9.769.420,00	(521,07)
Belanja Paket/Pengiriman	31.344.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Belanja Jasa Service Peralatan/Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	2.995.000,00	19,97	3.500.000,00	-
Belanja Jasa Iklan	250.000.000,00	46.500.000,00	18,60	0,00	100,00
Belanja Jasa Penyiaran Melalui Media Massa	505.000.000,00	99.600.000,00	19,72	89.160.675,00	10,48
Belanja Jasa Pihak Ketiga	3.995.750.000,00	54.850.000,00	1,37	63.450.000,00	-
Jumlah	5.165.744.600,00	302.687.600,00	5,86	202.635.095,00	33,05

3. Belanja Cetak dan Penggandaan **Rp57.843.600,00**

Belanja Cetak dan Penggandaan dianggarkan sebesar Rp483.762.240,00 dan sampai semester pertama Tahun Anggaran 2018 telah terealisasi sebesar Rp57.843.600,00 atau 11,96%. Sedangkan realisasi semester pertama tahun 2017 sebesar Rp33.091.000,00. Rincian obyek belanja cetak dan penggandaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Semester Pertama Tahun 2018			Semester Pertama Tahun 2017	Naik/Turun %
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Cetak	448.932.240,00	44.448.000,00	9,90	23.900.000,00	46,23
Belanja Penggandaan	34.000.000,00	13.395.600,00	39,40	9.191.000,00	31,39
Belanja Penjilidan	800.000,00	0,00	-	0,00	#DIV/0!
Jumlah	483.732.240,00	57.843.600,00	11,96	33.091.000,00	42,79

4. Belanja Sewa Sarana Mobilitas **Rp0,00**

Belanja Sewa Sarana Mobilitas tidak dianggarkan dan sampai semester pertama Tahun Anggaran 2018 belum terealisasi atau 0%. Sedangkan realisasi semester pertama tahun 2017 sebesar Rp0,00. Rincian obyek belanja sewa sarana mobilitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Semester Pertama Tahun 2018			Semester Pertama Tahun 2017	Naik/Turun %
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
Jumlah	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!

5. Belanja Makanan dan Minuman **Rp4.000.000,00**

Belanja Makanan dan Minuman dianggarkan sebesar Rp32.000.000,00 dan sampai semester pertama Tahun Anggaran 2018 telah terealisasi sebesar Rp4.000.000,00 atau 12,50%. Sedangkan realisasi semester pertama tahun 2017 sebesar Rp3.400.000,00. Rincian obyek belanja makanan dan minuman dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Semester Pertama Tahun 2018			Semester Pertama Tahun 2017	Naik/Turun %
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	32.000.000,00	4.000.000,00	12,50	3.400.000,00	15,00
Jumlah	32.000.000,00	4.000.000,00	12,50	3.400.000,00	15,00

6. Belanja Pakaian Khusus dan Hari – Hari Tertentu Rp35.750.000,00

Belanja Pakaian Khusus dan Hari – Hari Tertentu dianggarkan sebesar Rp35.750.000,00 dan sampai semester pertama Tahun Anggaran 2018 terealisasi sebesar Rp35.750.000,00 atau 100,00%. Sedangkan realisasi semester pertama tahun 2017 sebesar Rp0,00. Rincian obyek belanja pakaian khusus dan hari – hari tertentu dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Semester Pertama Tahun 2018			Semester Pertama Tahun 2017	Naik/Turun %
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Pakaian Batik Tradisional	35.750.000,00	35.750.000,00	100,00	-	100,00
Jumlah	35.750.000,00	35.750.000,00	100,00	-	-

7. Belanja Perjalanan Dinas Rp828.094.738,00

Belanja Perjalanan Dinas dianggarkan sebesar Rp1.844.518.060,00 dan sampai semester pertama Tahun Anggaran 2018 telah terealisasi sebesar Rp828.094.738,00 atau 44,89%. Sedangkan realisasi semester pertama tahun 2017 sebesar Rp354.170.241,00. Rincian obyek belanja perjalanan dinas dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Semester Pertama Tahun 2018			Semester Pertama Tahun 2017	Naik/Turun %
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.494.518.060,00	706.675.803,00	47,28	260.682.600,00	63,11
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	350.000.000,00	121.418.935,00	34,69	93.487.641,00	23,00
Jumlah	1.844.518.060,00	828.094.738,00	44,89	354.170.241,00	57,23

8. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Rp0,00

Pada anggaran tahun 2018 ini, Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS ditiadakan. Sedangkan realisasi pada semester pertama tahun 2017 tidak ada realisasi.

(dalam rupiah)

Uraian	Semester Pertama Tahun 2018			Semester Pertama Tahun 2017	Naik/Turun %
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Bimbingan Teknis	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
Jumlah	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!

9. Belanja Honorarium PNS **Rp0,00**

Belanja Honorarium PNS untuk tahun 2018 dianggarkan di Belanja Pegawai. Sedangkan realisasi semester pertama tahun 2017 sebesar Rp0,00. Rincian obyek belanja honorarium PNS dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Semester Pertama Tahun 2018			Semester Pertama Tahun 2017	Naik/Turun %
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-	-	-	0,00	-
Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	0,00	-
Belanja Honorarium Pengelola Uang dan Barang	-	-	-	0,00	-
Jumlah	-	-	-	-	-

10. Belanja Honorarium Non PNS **Rp0,00**

Belanja Honorarium Non PNS untuk tahun 2018 dianggarkan di Belanja Pegawai. Sedangkan realisasi semester pertama tahun 2017 sebesar Rp0,00. Rincian obyek belanja honorarium non PNS dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Semester Pertama Tahun 2018			Semester Pertama Tahun 2017	Naik/Turun %
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	-	-	-	0,00	-
Jumlah	-	-	-	-	-

c. Belanja Modal **Rp0,00**

Belanja Modal dianggarkan pada tahun 2018 sebesar 275.522.900 Namun realisasi sampai dengan semester pertama belum ada. Sedangkan realisasi semester pertama tahun 2017 sebesar Rp 0,00. Secara rinci realisasi Belanja Modal dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.5.
Rincian Realisasi Belanja Modal Semester Pertama TA 2018

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah (Berkurang)		Realisasi Semester Pertama 2017
	Anggaran 2018	Realisasi Semester Pertama 2018	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6
Belanja Modal Tanah					
Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Gedung Bangunan	-	-	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin					
Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor	-	-	-	#DIV/0!	-
Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	-	-	-	#DIV/0!	-
Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	-	-	-	#DIV/0!	-
Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	51.887.450,00	-	(51.887.450,00)	-	-
Belanja Modal Pengadaan Komputer	113.113.750,00	-	(113.113.750,00)	-	-
Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	-	-	-	-	-
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	83.634.250,00	-	(83.634.250,00)	-	-
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	26.887.450,00	-	(26.887.450,00)	-	-
Belanja Modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	-	-	-	#DIV/0!	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan					
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	-	-	-	#DIV/0!	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan					
Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik	-	-	-	#DIV/0!	-
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya					
Belanja Modal Pengadaan Buku	-	-	-	#DIV/0!	-
Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	-	-	-	#DIV/0!	-
Jumlah	275.522.900,00	-	(275.522.900,00)	-	-

1. Belanja Modal – Pengadaan Alat Rumah Tangga Rp0,00

Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga dianggarkan pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp51.887.450 namun belum ada realisasi sampai dengan semester pertama 2018. Sedangkan realisasi semester pertama tahun 2017 tidak ada realisasi. Rincian obyek belanja modal pengadaan komputer dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Semester Pertama Tahun 2018			Semester Pertama Tahun 2017	Naik/Turun %
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Modal Pengadaan - Meubelair	51.887.450,00	-	-	-	-
Jumlah	51.887.450,00	-	-	-	-

2. Belanja Modal – Pengadaan Komputer Rp0,00

Belanja Modal Pengadaan Komputer dianggarkan pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp113.113.750,00 namun realisasi sampai dengan semester pertama tahun 2018 belum ada. Sedangkan realisasi semester pertama tahun 2017 tidak ada realisasi. Rincian obyek belanja modal pengadaan komputer dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Semester Pertama Tahun 2018			Semester Pertama Tahun 2017	Naik/Turun %
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	58.264.850,00	-	-	-	-
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Mini Komputer	31.974.450,00	-	-	-	-
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	22.874.450,00	-	-	-	-
Jumlah	113.113.750,00	-	-	-	-

3. Belanja Modal – Pengadaan Alat Studio Rp0,00

Belanja Modal Pengadaan Alat Studio dianggarkan pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp83.634.250,00 namun belum ada realisasi sampai dengan semester pertama 2018. Sedangkan realisasi semester pertama tahun 2017 tidak ada realisasi. Rincian obyek belanja modal pengadaan komputer dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Semester Pertama Tahun 2018			Semester Pertama Tahun 2017	Naik/Turun %
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	83.634.250,00	-	-	-	-
Jumlah	83.634.250,00	-	-	-	-

4. Belanja Modal – Pengadaan Alat Komunikasi Rp0,00

Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi dianggarkan pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp26.887.450,00, namun belum ada realisasi sampai dengan semester pertama 2018. Sedangkan realisasi semester pertama tahun 2017 tidak ada realisasi. Rincian obyek belanja modal pengadaan komputer dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Semester Pertama Tahun 2018			Semester Pertama Tahun 2017	Naik/Turun %
	Anggaran	Realisasi	%		
Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi	26.887.450,00	-	-	-	-
Jumlah	26.887.450,00	-	-	-	-

V.1.3. PENDAPATAN-LO

Pendapatan Asli Daerah (PAD) :

Tidak ada kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) Biro pada Biro Protokol dan Komunikasi Publik.

V.1.4. BEBAN

Beban Biro Protokol dan Komunikasi Publik semester pertama tahun anggaran 2018 sebesar Rp1.852.680.065,00 atau naik sebesar 11,38% dari beban semester pertama tahun 2017 sebesar Rp1.61.885.983.33,00

dikelompokkan menjadi empat yaitu beban operasi, beban transfer, defisit non operasional, dan beban luar biasa.

Tabel 5.7.
Rincian Beban Semester Pertama TA 2018

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Semester Pertama 2018	Saldo Semester Pertama 2017	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
1	2	3	4	5
BEBAN OPERASI	1.852.680.065,00	1.641.885.938,33	210.794.126,67	11,38
Beban Pegawai - LO	196.495.000,00	182.815.000,00	13.680.000,00	6,96
Beban Barang dan Jasa	1.515.675.638,00	1.222.602.051,00	293.073.587,00	19,34
Beban Bunga	-	-	-	-
Beban Subsidi	-	-	-	-
Beban Hibah	-	-	-	-
Beban Bantuan Sosial	-	-	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	140.509.427,00	236.468.887,33	(95.959.460,33)	(68,29)
Beban Penyisihan Piutang	-	-	-	-
Beban Lain - Lain	-	-	-	-
BEBAN TRANSFER	-	-	-	-
beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	-	-	-	-
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemda Lainnya	-	-	-	-
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	-	-	-	-
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	-	-
Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa	-	-	-	-
DEFISIT NON OPERASIONAL	-	-	-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	-	-	-	-
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	-	-	-	-
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	-	-	-	-
BEBAN LUAR BIASA	-	-	-	-
Beban Luar Biasa	-	-	-	-
Jumlah Beban	1.852.680.065,00	1.641.885.938,33	210.794.126,67	11,38

a. Beban Operasi Rp1.641.885.938,33

Beban Operasi semester pertama tahun anggaran 2017 sebesar Rp1.641.885.938,33 atau turun sebesar 33,53% dari beban operasi semester pertama tahun 2016 senilai Rp43.772.624.474,44. Beban Operasi terdiri atas Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Penyusutan dan Amortisasi. Rincian beban operasi adalah sebagai berikut:

Tabel 5.7.
Rincian Beban Operasi Semester Pertama TA 2018

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Semester Pertama 2018	Saldo Semester Pertama 2017	Kenaikan/ (Penurunan)
1	2	3	4
Beban Pegawai	196.495.000,00	182.815.000,00	13.680.000,00
Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - LO	6.750.000,00	4.250.000,00	2.500.000,00
Beban Honorarium Pengelola Uang dan Barang - LO	46.800.000,00	39.000.000,00	7.800.000,00
Beban Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap - LO	142.945.000,00	139.565.000,00	3.380.000,00
Beban Barang dan Jasa	1.515.675.638,00	1.222.602.051,00	271.486.293,00
Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	27.956.500,00	22.999.600,00	4.956.900,00
Beban Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.350.000,00	1.800.000,00	(450.000,00)
Beban Dokumentasi	9.986.000,00	14.000.000,00	(4.014.000,00)
Beban Baliho	124.700.000,00	18.500.000,00	106.200.000,00
Beban Bahan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	-
Beban Jasa Surat Kabar/Majalah	143.196.800,00	187.086.000,00	(43.889.200,00)
Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet	1.573.000,00	9.769.420,00	(8.196.420,00)
Beban Jasa Paket/Pengiriman	0,00	2.700.000,00	(2.700.000,00)
Beban Jasa Service Peralatan/Perlengkapan Kantor	3.495.000,00	3.650.000,00	(155.000,00)
Beban Jasa Iklan	46.500.000,00	0,00	46.500.000,00
Beban Jasa Penyiaran Melalui Media Massa	141.500.000,00	166.960.675,00	(25.460.675,00)
Beban Jasa Pihak Ketiga	54.850.000,00	117.300.000,00	(62.450.000,00)
Beban Cetak	64.348.000,00	36.600.000,00	27.748.000,00
Beban Penggandaan	13.395.600,00	16.700.000,00	(3.304.400,00)
Beban Penjilidan	0,00	0,00	-
Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	0,00	-
Beban Makanan dan Minuman Rapat	4.000.000,00	4.800.000,00	(800.000,00)
Beban Pakaian Kerja Lapangan	0,00	0,00	-
Beban Pakaian Batik Tradisional	35.750.000,00	0,00	35.750.000,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	721.655.803,00	519.904.715,00	201.751.088,00
Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	121.418.935,00	99.831.641,00	21.587.294,00
Beban Bimbingan Teknis	-	-	-
Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - LO	-	-	-
Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - LO	-	-	-
Beban Honorarium Pengelola Uang dan Barang - LO	-	-	-
Beban Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap - LO	-	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	140.509.427,00	236.468.887,33	(95.959.460,33)
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	50.875.814,00	68.283.046,00	(17.407.232,00)
Beban Penyusutan Alat Kantor	2.531.772,00	8.631.772,00	(6.100.000,00)
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	6.392.761,00	16.942.761,00	(10.550.000,00)
Beban Penyusutan Komputer	37.876.330,00	65.038.892,00	(27.162.562,00)
Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	1.100.000,00	(1.100.000,00)
Beban Penyusutan Alat Studio	18.283.750,00	46.463.083,00	(28.179.333,00)
Beban Penyusutan Alat Komunikasi	19.561.500,00	19.841.500,00	(280.000,00)
Beban Penyusutan Peralatan Pemancar	4.987.500,00	4.987.500,00	-
Beban Penyusutan Barang Tidak Diketahui Keberadaannya	0,00	5.180.333,33	(5.180.333,33)
Beban Lain - Lain	-	-	-
Beban Lain - Lain	-	-	-
Jumlah Beban	1.852.680.065,00	1.405.417.051,00	189.206.832,67

1. Beban Pegawai Rp196.495.000,00

Beban Pegawai semester pertama TA 2017 sebesar Rp196.495.000,00 sedangkan realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp142.945.000,00 selisih sebesar (Rp 53.550.000,00). Selisih tersebut karena pembayaran yang belum direalisasikan pada triwulan II. Beban Pegawai semester pertama TA 2017 sebesar Rp182.815.000,00. Rincian beban pegawai sebagai berikut:

Tabel 5.8.
Rincian Beban Pegawai Semester Pertama TA 2018

(dalam rupiah)

Uraian	Semester Pertama Tahun 2018		Selisih	Saldo Semester Pertama Tahun 2017
	Beban	Realisasi Belanja		
1	2	3	4	5
Beban Pegawai				
Honorarium PNS	53.550.000,00	-	53.550.000,00	43.250.000,00
Honorarium Non PNS	142.945.000,00	142.945.000,00	-	139.565.000,00
Jumlah	196.495.000,00	142.945.000,00	53.550.000,00	182.815.000,00

a. Beban Honorarium PNS Rp53.550.000,00

Beban Honorarium PNS semester pertama TA 2018 sebesar Rp53.550.000,00 realisasi Belanja Honorarium PNS sebesar Rp0,00. Beban Honorarium PNS semester pertama TA 2017 sebesar Rp0,00. Rincian obyek beban honorarium PNS dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Semester Pertama Tahun 2018		Selisih	Semester Pertama Tahun 2017
	Beban	Realisasi Belanja		
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.750.000,00	-	6.750.000,00	4.250.000,00
Honorarium Pengelola Uang dan Barang	46.800.000,00	-	46.800.000,00	39.000.000,00
Jumlah	53.550.000,00	-	53.550.000,00	4.250.000,00

b. Beban Honorarium Non PNS Rp142.945.000,00

Beban Honorarium Non PNS semester pertama TA 2018 sebesar Rp142.945.000,00, sama dengan realisasi Belanja Honorarium Non PNS sebesar Rp142.945.000,00. Beban Honorarium Non PNS semester pertama TA 2017 Sebesar Rp139.565.000. Rincian obyek beban honorarium non PNS dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Semester Pertama Tahun 2018		Selisih	Semester Pertama Tahun 2017
	Beban	Realisasi Belanja		
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	142.945.000,00	142.945.000,00	-	139.565.000,00
Jumlah	142.945.000,00	139.565.000,00	-	139.565.000,00

2. Beban Barang dan Jasa Rp1.515.675.638,00

Beban Barang dan Jasa semester pertama TA 2018 sebesar Rp1.515.675.638,00 sedangkan realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.346.818.438,00. Selisih antara beban barang dan jasa dengan realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp168.857.200,00. Beban Barang dan Jasa semester pertama TA 2017 sebesar Rp1.222.602.051,00. Rincian beban barang dan jasa sebagai berikut:

Tabel 5.9.
Rincian Beban Barang dan Jasa Semester PertamaTA 2018

(dalam rupiah)

URAIAN	Semester Pertama Tahun 2018		Selisih	Semester Pertama Tahun 2017
	Beban	Realisasi Belanja		
Beban Barang dan Jasa				
Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	27.956.500,00	27.956.500,00	0,00	22.999.600,00
Beban Persediaan Peranko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.350.000,00	1.050.000,00	300.000,00	1.800.000,00
Beban Dokumentasi	9.986.000,00	9.986.000,00	0,00	14.000.000,00
Beban Baliho	124.700.000,00	79.450.000,00	45.250.000,00	18.500.000,00
Beban Bahan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Jasa Surat Kabar/Majalah	143.196.800,00	97.169.600,00	46.027.200,00	187.086.000,00
Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet	1.573.000,00	1.573.000,00	0,00	9.769.420,00
Beban Jasa Paket/Pengiriman	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
Beban Jasa Service Peralatan/Perlengkapan Kantor	3.495.000,00	2.995.000,00	500.000,00	3.650.000,00
Beban Jasa Iklan	46.500.000,00	46.500.000,00	0,00	
Beban Jasa Penyiaran Melalui Media Massa	141.500.000,00	99.600.000,00	41.900.000,00	166.960.675,00
Beban Jasa Pihak Ketiga	54.850.000,00	54.850.000,00	0,00	117.300.000,00
Beban Cetak	64.348.000,00	44.448.000,00	19.900.000,00	36.600.000,00
Beban Penggandaan	13.395.600,00	13.395.600,00	0,00	16.700.000,00
Beban Penjilidan	0,00	0,00	0,00	
Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.800.000,00
Beban Pakaian kerja lapangan	0	0	0	0
Beban Pakaian Batik Tradisional	35.750.000,00	35750000	0	0
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	721.655.803,00	706.675.803,00	14.980.000,00	519.904.715,00
Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	121.418.935,00	121.418.935,00	0,00	99.831.641,00
Beban Bimbingan Teknis	0	0	0	0
Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - LO	0	0	0	0
Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - LO	0	0	0	0
Beban Honorarium Pengelola Uang dan Barang - LO	0	0	0	0
Beban Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap - LO	0	0	0	0
JUMLAH	1.515.675.638,00	1.346.818.438,00	168.857.200,00	1.222.602.051,00

a. Beban Bahan Pakai Habis Rp163.992.500,00

Beban Bahan Pakai Habis semester pertama TA 2018 sebesar Rp163.992.500,00 sedangkan realisasi Belanja Pakai Habis sebesar Rp118.442.500,00, selisih sebesar Rp45.550.000,00. Selisih tersebut karena belum teralisasikannya pembayaran di triwulan II. Beban Bahan Pakai Habis semester pertama TA 2017 sebesar Rp57.299.600,00. Rincian mutasi beban bahan pakai habis sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Semester Pertama Tahun 2018				Beban Semester Pertama Tahun 2017
	Belanja a	Penambahan b	Pengurangan c	Beban e	
Alat Tulis Kantor	27.956.500,00	-	-	27.956.500,00	22.999.600,00
Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.050.000,00	300.000	-	1.350.000,00	1.800.000,00
Dokumentasi	9.986.000,00	-	-	9.986.000,00	14.000.000,00
Balibo	79.450.000,00	45.250.000	-	124.700.000,00	18.500.000,00
Jumlah	118.442.500,00	45.550.000,00	-	163.992.500,00	57.299.600,00

b. Beban Jasa Kantor Rp391.114.800,00

Beban Jasa Kantor semester pertama TA 2018 sebesar Rp391.114.800,00 sedangkan realisasi Belanja Jasa Kantor sebesar Rp302.687.600,00, selisih sebesar (Rp88.427.200,00). Beban Jasa Kantor semester pertama TA 2017 sebesar Rp487.466.095,00. Rincian obyek beban jasa kantor dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Semester Pertama Tahun 2018		Selisih	Semester Pertama Tahun 2017
	Beban	Realisasi Belanja		
Jasa surat kabar/ Majalah	143.196.800,00	97.169.600,00	46.027.200,00	187.086.000,00
Jasa Kawat/Faksimili/Internet	1.573.000,00	1.573.000,00	-	9.769.420,00
Jasa Paket/Pengiriman	0,00	0,00	-	2.700.000,00
Jasa Service Peralatan/Perlengkapan Kantor	3.495.000,00	2.995.000,00	500.000,00	3.650.000,00
Belanja Jasa Iklan	46.500.000,00	46.500.000,00	-	-
Jasa Penyiaran Melalui Media Massa	141.500.000,00	99.600.000,00	41.900.000,00	166.960.675,00
Jasa Pihak Ketiga	54.850.000,00	54.850.000,00	-	117.300.000,00
Jumlah	391.114.800,00	302.687.600,00	88.427.200,00	487.466.095,00

c. Beban Cetak dan Penggandaan Rp77.743.600,00

Beban Cetak dan Penggandaan semester pertama TA 2018 sebesar Rp77.743.600,00 sedangkan realisasi Belanja Cetak dan Penggandaan Rp57.843.600,00. Terdapat selisih (Rp19.900.000,00) karena pembayaran belum direalisasikan pada triwulan II. Beban Cetak dan Penggandaan semester pertama TA 2017 sebesar Rp53.300.000,00. Rincian obyek beban cetak dan penggandaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Semester Pertama Tahun 2018		Selisih	Semester Pertama Tahun 2017
	Beban	Realisasi Belanja		
Cetak	64.348.000,00	44.448.000,00	19.900.000,00	36.600.000,00
Penggandaan	13.395.600,00	13.395.600,00	-	16.700.000,00
Penjilidan	-	-	-	-
Jumlah	77.743.600,00	57.843.600,00	19.900.000,00	53.300.000,00

d. Beban Sewa Sarana Mobilitas Rp0,00

Beban Sewa Sarana Mobilitas semester pertama TA 2018 sebesar Rp0,00, realisasi Belanja Sewa Sarana Mobilitas Rp0,00. Beban Sewa Sarana Mobilitas semester pertama TA 2017 sebesar Rp0,00. Rincian obyek beban sewa sarana mobilitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Semester Pertama Tahun 2018		Selisih	Semester Pertama Tahun 2017
	Beban	Realisasi Belanja		
Sewa Sarana Mobilitas Darat	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-

e. Beban Makanan dan Minuman Rp4.000.000,00

Beban Makanan dan Minuman semester pertama TA 2018 sebesar Rp4.000.000,00 sedangkan realisasi Belanja Makanan dan Minuman sebesar Rp4.000.000,00, selisih sebesar Rp0,00. Beban Makanan dan Minuman semester pertama TA 2016 sebesar Rp4.800.000,00. Rincian obyek beban makanan dan minuman dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Semester Pertama Tahun 2018		Selisih	Semester Pertama Tahun 2017
	Beban	Realisasi Belanja		
Makanan dan Minuman Rapat	4.000.000,00	4.000.000,00	-	4.800.000,00
Jumlah	4.000.000,00	4.000.000,00	-	4.800.000,00

f. Beban Pakaian Kerja Rp0,00

Tidak ada realisasi Beban Pakaian Kerja semester pertama TA 2018 sedangkan Beban Pakaian Kerja semester pertama TA 2017 sebesar Rp0,00. Rincian obyek beban pakaian kerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Semester Pertama Tahun 2018		Selisih	Semester Pertama Tahun 2017
	Beban	Realisasi Belanja		
Pakaian Kerja Lapangan	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-

g. Beban Pakaian Khusus dan Hari – Hari Tertentu Rp35.750.000,00

Realisasi Beban Pakaian Khusus dan Hari – Hari Tertentu semester pertama TA 2018 sebesar Rp35.750.000,00 sedangkan realisasi belanja Pakaian Khusus dan Hari–hari Tertentu sebesar Rp35.750.000, Beban semester pertama TA 2017 tidak ada. Rincian obyek beban pakaian khusus dan hari – hari tertentu dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Semester Pertama Tahun 2018		Selisih	Semester Pertama Tahun 2017
	Beban	Realisasi Belanja		
Pakaian Batik Tradisional	35.750.000,00	35.750.000,00	-	-
Jumlah	35.750.000,00	35.750.000,00	-	-

h. Beban Perjalanan Dinas Rp843.074.738,00

Beban Perjalanan Dinas semester pertama TA 2018 sebesar Rp843.074.738,00 sedangkan realisasi Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp828.094.738,00. Beban Perjalanan Dinas semester pertama TA 2017 sebesar Rp619.736.356,00. Selisih (Rp14.980.000,00) disebabkan pembayaran belum direalisasikan di triwulan II. Rincian obyek beban perjalanan dinas dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Semester Pertama Tahun 2018		Selisih	Semester Pertama Tahun 2017
	Beban	Realisasi Belanja		
Perjalanan Dinas Dalam Daerah	721.655.803,00	706.675.803,00	14.980.000,00	519.904.715,00
Perjalanan Dinas Luar Daerah	121.418.935,00	121.418.935,00	-	99.831.641,00
Jumlah	843.074.738,00	828.094.738,00	14.980.000,00	619.736.356,00

i. Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Rp0,00

Beban dan realisasi Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS semester pertama TA 2018 sebesar Rp0,00 karena tidak dianggarkan. Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS semester pertama TA 2017 sebesar Rp0,00. Rincian obyek beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Semester Pertama Tahun 2018		Selisih	Semester Pertama Tahun 2017
	Beban	Realisasi Belanja		
Bimbingan Teknis	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-

j. Beban Honorarium PNS Rp0,00

Beban Honorarium PNS semester pertama TA 2018 masuk ke kelompok Beban Pegawai sedangkan Beban Honorarium PNS semester pertama TA 2017 sebesar Rp0,00. Rincian obyek beban honorarium PNS dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Semester Pertama Tahun 2018		Selisih	Semester Pertama Tahun 2017
	Beban	Realisasi Belanja		
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-	-	-	-
Honorarium Tim Pengadaan Barang & Jasa	-	-	-	-
Honorarium Pengelola Uang dan Barang	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-

k. Beban Honorarium Non PNS Rp0,00

Beban Honorarium Non PNS semester pertama TA 2018 masuk ke kelompok Beban Pegawai sedangkan Beban Honorarium Non PNS semester pertama TA 2017 sebesar Rp0,00. Rincian obyek beban honorarium non PNS dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Semester Pertama Tahun 2018		Selisih	Semester Pertama Tahun 2017
	Beban	Realisasi Belanja		
Honorarium Tenaga Honorar/Tidak Tetap	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-

3. Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp140.509.427,00

Beban Penyusutan dan Amortisasi semester pertama TA 2018 sebesar Rp140.509.427,00 sedangkan semester pertama TA 2017 sebesar Rp236.468.887,33. Rincian obyek beban penyusutan dan amortisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Semester Pertama Tahun 2018		Semester Pertama Tahun 2017
	Beban	Realisasi Belanja	
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	50.875.814,00		68.283.046,00
Beban Penyusutan Alat Kantor	2.531.772,00		8.631.772,00
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	6.392.761,00		16.942.761,00
Beban Penyusutan Komputer	37.876.330,00		65.038.892,00
Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00		1.100.000,00
Beban Penyusutan Alat Studio	18.283.750,00		46.463.083,00
Beban Penyusutan Alat Komunikasi	19.561.500,00		19.841.500,00
Beban Penyusutan Peralatan Pemancar	4.987.500,00		4.987.500,00
Beban Penyusutan Barang Tidak Diketahui Keberadaannya	0,00		5.180.333,33
Jumlah	140.509.427,00	-	236.468.887,33

V.1.5. ASET

Aset terdiri atas :

1. ASET LANCAR

Aset lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi. Aset lancar terdiri dari:

a) Kas Bendahara Penerimaan

Saldo kas di bendahara penerimaan per 30 Juni 2018 dan per 30 Juni 2017 sebesar Rp0,00.

b) Kas Bendahara Pengeluaran

Saldo kas di bendahara pengeluaran per 30 Juni 2018 sebesar Rp527.592.800, dengan rincian saldo kas tunai Rp 141.524.362 dan saldo kas bank Rp 386.068.438 . Saldo kas di bendahara pengeluaran per 30 Juni 2017 sebesar 151.894.285,00, dengan rincian saldo kas tunai Rp114.147.949,00 dan saldo kas bank Rp37.746.336,00,00.

c) Piutang Lain-lain

Saldo piutang lain-lain per 30 Juni 2018 dan 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp. 0.00

d) Persediaan

Saldo persediaan barang pakai habis per 30 Juni 2018 sebesar Rp0,00 sedangkan saldo per 30 Juni 2017 juga sebesar Rp0,00. Rincian persediaan dapat dijelaskan sebagai berikut

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo Awal 2018	Penambahan	Pengurangan	Saldo 30 Juni 2018
1.	Persediaan Alat Tulis Kantor	-	27.956.500,00	27.956.500,00	-
2.	Persediaan Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya	-	1.050.000,00	1.050.000,00	-
3.	Persediaan Cetak	-	44.448.000,00	44.448.000,00	-
4.	Persediaan Makanan & Minuman Rapat	-	4.000.000,00	4.000.000,00	-
	Jumlah	-	77.454.500,00	77.454.500,00	-

2. INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, deviden dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan salah satu instrumen untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Investasi dikategorikan berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek (3 – 12 bulan) dan investasi jangka panjang (lebih dari 12 bulan).

a) Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Saldo investasi jangka panjang non permanen per 30 Juni 2018 dan per 30 Juni 2017 Rp0,00.

b) Investasi Jangka Panjang Permanen

Saldo investasi jangka panjang permanen per 30 Juni 2018 dan per 30 Juni 2017 Rp0,00.

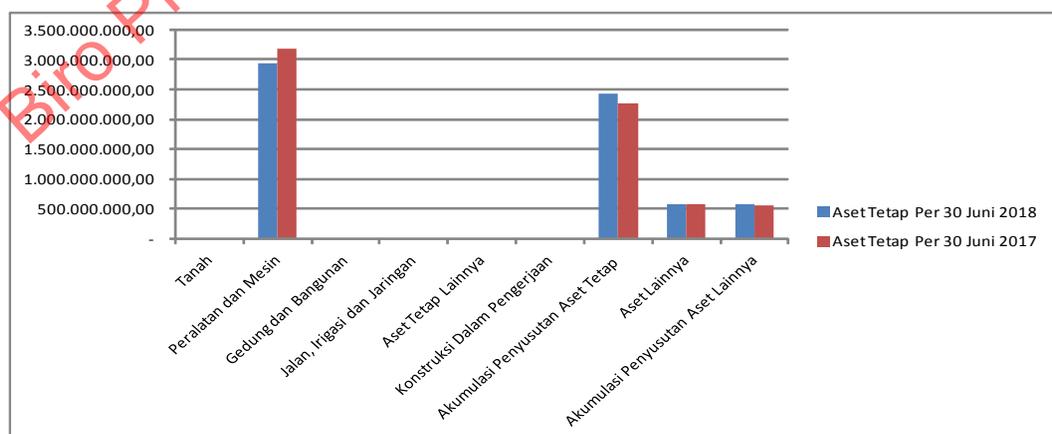
3. ASET TETAP

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai aset tetap per 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp522.198.215,00. Sedangkan saldo aset tetap per 30 Juni 2017 sebesar Rp917.398.092,00. Perbandingan rincian aset tetap, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.10.
Rincian Aset Tetap Per 30 Juni 2018

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal 01 Januari 2018	Mutasi		Saldo Akhir 30 Juni 2018
		Tambah	Kurang	
Tanah	-	-	-	-
Peralatan dan Mesin	3.187.941.171,00	-	243.701.251,00	2.944.239.920,00
Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan	2.486.252.993,00	-	-	2.422.041.705,00
Jumlah Aset Tetap	701.688.178,00	-	243.701.251,00	522.198.215,00
Aset Lainnya	567.406.560,00	-	-	567.406.560,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	567.406.560,00	-	-	567.406.560,00
Jumlah Aset Lainnya	-	-	-	-
Jumlah	701.688.178,00	-	243.701.251,00	522.198.215,00



a) Tanah Rp0,00

Tidak belanja modal untuk tanah karena Biro Protokol dan Komunikasi Publik tidak memiliki aset tanah.

b) Peralatan dan mesin Rp2.944.239.920,00

Peralatan dan Mesin yang dimiliki Biro Protokol dan Komunikasi Publik per 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp2.944.239.920,00, sedangkan per 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp3.187.941.171,00. Mutasi peralatan dan mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	30 Juni 2018
Saldo Awal Per 01 Januari 2017 (a)	Rp 3.187.941.171,00
Penambahan:	
- Pembelian	Rp -
- Transfer Masuk	Rp -
- Koreksi Nilai (kapitalisasi nilai perolehan (MAK 52))	Rp -
- Pengembangan	Rp -
- Reklasifikasi Masuk	Rp -
- Pengalihan (masuk)	Rp -
Jumlah (b)	Rp -
Pengurangan:	
- Transfer Keluar	Rp 243.701.251,00
- Reklasifikasi Keluar	Rp -
- Pengalihan (keluar)	Rp -
- Koreksi Nilai	Rp -
Jumlah (c)	Rp 243.701.251,00
Kenaikan/Penurunan (b-c)	Rp (243.701.251,00)
Saldo Per 30 Juni 2018 (a+(b-c))	Rp 2.944.239.920,00

Rincian saldo peralatan dan mesin per 30 Juni 2018 sebagai berikut:

NAMA BARANG INVENTARIS	SALDO		MUTASI		SALDO PER 30 JUNI 2018
	1 JANUARI 2018 (Rp)		TAMBAH (Rp)	KURANG (Rp)	
Alat-alat Berat	-	-	-	-	-
Alat-alat Angkutan	1.170.397.171,00	-	-	243.701.251,00	926.695.920,00
Alat Bengkel/Alat Ukur	-	-	-	-	-
Alat Pertanian dan Peternakan	-	-	-	-	-
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	1.116.124.000,00	-	-	-	1.116.124.000,00
Alat Studio dan Alat Komunikasi	901.420.000,00	-	-	-	901.420.000,00
Alat-alat Kedokteran	-	-	-	-	-
Alat Laboratorium	-	-	-	-	-
Alat Keamanan	-	-	-	-	-
JUMLAH PERALATAN DAN MESIN	3.187.941.171,00	-	-	243.701.251,00	2.944.239.920,00

c) Gedung dan Bangunan Rp0,00

Tidak ada aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Biro Protokol dan Komunikasi Publik.

d) Jalan Irigasi dan Jaringan Rp0,00

Tidak ada aset Jalan Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Biro Protokol dan Komunikasi Publik.

e) Aset Tetap Lainnya Rp0,00

Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Biro Protokol dan Komunikasi Publik per 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp0,00, sedangkan per 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp0,00. Mutasi aset tetap lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

f) Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp0,00

Tidak ada aset Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki Biro Protokol dan Komunikasi Publik

g) Akumulasi Penyusutan Rp2.281.532.278,00

Akumulasi Penyusutan yang dimiliki Biro Protokol dan Komunikasi Publik per 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp2.281.532.278,00, sedangkan per 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp2.270.543.079,00.

JENIS PENYUSUTAN	AKUMULASI PENYUSUTAN PER 01 Januari 2018 (Rp)	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN ASET PER 30 Juni 2018 (Rp)
		SEMESTER I (Rp)	SEMESTER II (Rp)	
Akumulasi Penyusutan Alat-alat Berat	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan Alat-alat Angkutan	(600.313.239,00)	(50.875.814,00)	-	(651.189.053,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel/Alat Ukur	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian dan Peternakan	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan Alat-alat Kantor	(79.996.559,00)	(2.531.772,00)	-	(82.528.331,00)
Akumulasi Penyusutan Alat-alat Rumah Tangga	(236.531.716,00)	(6.392.761,00)	-	(242.924.477,00)
Akumulasi Penyusutan Komputer	(634.129.978,00)	(37.876.330,00)	-	(672.006.308,00)
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	(12.170.000,00)	-	-	(12.170.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Studio	(537.791.875,00)	(18.283.750,00)	-	(556.075.625,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi	(119.086.411,00)	(19.561.500,00)	-	(138.647.911,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar	(61.512.500,00)	(4.987.500,00)	-	(66.500.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan Alat Keamanan	-	-	-	-
JUMLAH AKUMULASI PENYUSUTAN	(2.281.532.278,00)	(140.509.427,00)	-	(2.422.041.705,00)

h) Aset Lainnya Rp567.406.560,00

Aset Lainnya yang dimiliki Biro Protokol dan Komunikasi Publik per 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp567.406.560,00 sedangkan per 1 Januari 2018 adalah sebesar Rp567.406.560,00. Mutasi aset lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	30 Juni 2018
Saldo Awal Per 01 Januari 2018 (a)	Rp 567.406.560,00
Penambahan:	
-	Rp -
- Jumlah (b)	Rp -
Pengurangan:	
-	Rp -
- Jumlah (c)	Rp -
Kenaikan/Penurunan (b-c)	Rp -
Saldo Per 30 Juni 2018 (a+(b-c))	Rp 567.406.560,00

V.1.6. KEWAJIBAN

Kewajiban terdiri atas :

1. Kewajiban Jangka Pendek

a) Utang Penghitungan Pihak Ketiga (PFK)

Saldo utang penghitungan pihak ketiga (PFK) per 30 Juni 2018 dan per 31 Juni 2017 Rp0,00.

b) Utang Bunga

Saldo utang bunga per 30 Juni 2018 dan per 30 Juni 2017 Rp0,00.

c) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Saldo bagian lancar utang jangka panjang per 30 Juni 2018 dan per 30 Juni 2017 Rp0,00.

d) Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo pendapatan diterima dimuka per 30 Juni 2018 dan per 30 Juni 2017 Rp0,00.

e) Utang Beban

Saldo utang beban per 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp 0,00 dan per 30 Juni 2017 Rp 130.000.000,00.

f) Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo utang jangka pendek lainnya per 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp 0,00 dan per 30 Juni 2017 sebesar Rp0,00.

g) Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan

Saldo kewajiban untuk dikonsolidasikan per 30 Juni 2018 sebesar Rp2.239.763.438 dan per 30 Juni 2017 Rp1.427.311.336,00.

2. Kewajiban Jangka Panjang

a) Utang Dalam Negeri

Saldo utang dalam negeri per 30 Juni 2018 dan per 30 Juni 2017 adalah Rp0,00.

b) Utang Jangka Panjang Lainnya

Saldo utang jangka panjang lainnya per 30 Juni 2018 dan per 30 Juni 2017 Rp0,00.

V.1.7. EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih Biro Protokol dan Komunikasi Publik yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Ekuitas akhir Biro Protokol dan Komunikasi Publik per 30 Juni 2018 sebesar Rp 1.049.791.015,00, sedangkan per 30 Juni 2017 sebesar Rp811.059.460,33,00. Perubahan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	30 Juni 2018
Ekuitas Awal	Rp 701.688.178,00
Surplus/Defisit-LO	Rp (1.852.680.065,00)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	
- Koreksi Nilai Persediaan	Rp -
- Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp -
- Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp (38.980.536,00)
- Kewajiban untuk dikonsolidasikan	Rp 2.239.763.438,00
Saldo Per 30 Juni 2018	Rp 1.049.791.015,00

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

VI.1 Pengungkapan penting lainnya

Tidak ada kejadian luar biasa yang signifikan baik bencana alam maupun sosial yang di luar kemampuan Biro Protokol dan Komunikasi Publik Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

VI.2 Temuan dan tindak lanjut temuan BPK

Tidak ada temuan dari BPK.

VI.3 Rekening pemerintah

Biro Protokol dan Komunikasi Publik Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tidak memiliki rekening BANK untuk penarikan anggaran/kas dilakukan secara tunai melalui Bendahara Pengeluaran.

Biro Protokol dan Komunikasi Publik

BAB VII

PENUTUP

Sebagai penutup Catatan Atas Laporan Keuangan Biro Protokol dan Komunikasi Publik Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2018 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyusunan Laporan Keuangan Biro Protokol dan Komunikasi Publik Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2018 disusun dengan berpedoman pada Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan ini mengacu pada Prinsip-prinsip Akuntansi yang Berterima Umum (PABU) dengan basis/dasar akrual. Basis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan.
3. Diharapkan dengan diterbitkannya Laporan Keuangan, dapat dijadikan salah satu sumber informasi bagi pihak eksternal yaitu para *stakeholders* dalam memahami kondisi dan kemampuan yang tergambar dalam Laporan Keuangan Biro Protokol dan Komunikasi Publik Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2018.

Demikian Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan Biro Protokol dan Komunikasi Publik Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2018 disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 31 Juli 2018

KEPALA BIRO PROTOKOL DAN
KOMUNIKASI PUBLIK,



HM. ISTANI, SH
Pembina Tingkat I

NIP. 19630704 198803 1 015

DAFTAR LAMPIRAN

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) output Aplikasi SIMDA Keuangan
2. Neraca output Aplikasi SIMDA Keuangan
3. Laporan Operasional output Aplikasi SIMDA Keuangan
4. Laporan Perubahan Ekuitas output Aplikasi SIMDA Keuangan
5. Rekonsiliasi Keuangan
6. Rekonsiliasi Persediaan
7. Rekonsiliasi Aset
8. Bukti STS UP Per 30 JUNI 2018
9. SPJ FS Per 30 Juni 2018
10. Rekap SP2D (UP/GU/TU/LS/Nihil)
11. BAP Kas Per 30 Juni 2018
12. BAP Stock Opname per Per 30 Juni 2018
13. Kartu Inventaris Barang (KIB A, B, C, D, E, F)
14. Daftar Aset Lainnya
15. Daftar Aset Extra Comptable
16. Daftar Akumulasi Penyusutan

Biro Protokol dan Komunikasi Publik



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B
PERALATAN DAN MESIN

Provinsi : PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Kab./Kota : PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Bidang : Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : Biro Humas dan Protokol
U P B : Biro Humas dan Protokol
NO. KODE LOKASI : 11.24.00.04.01.04.01

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pembelian	Pabrik	Rangka	Nomor Mesin	Polisi	BPKB	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	02.03.01.02.03	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	0003	ISUZU ELF / 77 PS MICRO BUS PRONA		Campuran	2006				KH 7008 AU		Pembelian	174,235.444	
4	02.03.01.02.03	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	0004	Toyota / Rush 1.5 S		Campuran	2011		MHFECJ3JBK039970	DCH4977	KH 1186 AU	106795486 M	Pembelian	226,739.787	Operasional Kepala Bagian Protokol Bpk Agus Siswadi
5	02.03.01.02.03	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	0005	TOYOTA / Kijang Innova		Campuran	2012		MHF4W42G2C2215746	1TR7258868	KH 1247 AU	J-04701774	Pembelian	255,000.000	Operasional Karo Humas dan Protokol
6	02.03.01.03.02	Pick Up	0001	Colorado LT Crew / Cab 2.5I M/T	2499 cc		2015		MMM148FGODH603591	A9DG121251142	KH 8686 AW		Pembelian	343,155.935	Biro Humas Protokol Setda Provinsi Kalimantan Tengah, mutasi dari Biro Aset, berdasarkan SK Gubernur No. 188.44/121/2015
12	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	0006	SUZUKI / FD 125 XSD	125	Campuran	2006		MH8FD125X7J806535	F4031D806680	KH 3797 AY	936592 M	Pembelian	13,381.079	Doyo H Timbang
15	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	0009	HONDA / NF		Campuran	2007		HB42E11212164	HB42137K125593	KH 4082 AY	4405361 M	Pembelian	13,118.000	AN (ALM) KRISSASI (DI PEGANG YBS)
16	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	0010	KAWASAKI			2007		MH4AN112P7KP00857	AN112BEPC3647	KH 4175 AY	4408307	Pembelian	13,700.000	AGASTINUS B ASSAN (DIPEGANG YBS)
17	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	0011	Yamaha / 2P2 Jupiter Z		Campuran	2011		MH331B003BJ9571776	31B957221	KH 5354 AY	105936727 M	Pembelian	15,120.980	Immanuel H Samad
18	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	0012	Honda / NF		Campuran	2013				KH 5664 AY		Pembelian	15,690.216	Himawan
19	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	0013	Honda / Vario		Campuran	2013				KH 5688 AY		Pembelian	15,507.164	Fried Damek
21	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	0019	HONDA SUPRA X 125 / NF125TR5 M/T	125CC	BESI	2014		MH1JB9139DK448682	JB91E3431677	KH 5970 AY		Pembelian	16,961.464	mutasi dari ro.aset
22	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	0020	HONDA SUPRA X 125 /	125CC	BESI	2014		MH1JB9130DK49162	JB91E3431795	KH 5949 AY		Pembelian	16,961.464	BIRO HUMAS DAN PROTOKOL



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B
PERALATAN DAN MESIN

Provinsi : PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Kab./Kota : PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Bidang : Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : Biro Humas dan Protokol
U P B : Biro Humas dan Protokol
NO. KODE LOKASI : 11.24.00.04.01.04.01

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pembelian	Pabrik	Rangka	Nomor Mesin	Polisi	BPKB	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	0021	NF125TR5 M/T HONDA SUPRA X 125 / NF125TRS M/T	125 CC	BESI	2014		MH1J9139DK45800 6	JB91E3440303	KH 5784 AY		Pembelian	16,961.464	BIRO HUMAS DAN PROTOKOL/mut asi ro.aset
24	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	0022	HONDA SUPRA X 125 / NF125TR5 M/T	125CC	BESI	2014		MH1JB9134DK4532 32	JB91E3435774	KH 5961 AY		Pembelian	16,961.464	BIRO HUMAS DAN PROTOKOL/mut asi ro.aset
25	02.03.01.05.02	Scooter	0001	HONDA / VARIO TECHNO PGM F1 (NC112A1CF A/T)	125	BESI	2014		JFB127EK262988	JFB1E2217454	KH 2176 TY		Pembelian	16,902.710	BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH/mutasi dari ro.aset
28	02.06.01.01.02	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	0001 s/d 0002	-		Besi	2012						Pembelian	4,800.000	
33	02.06.01.02.13	Mesin Hitung/Jumlah Lain-lain	0001	Secure / LD- 26M		Plastik	2013						Pembelian	2,955.225	lael Selvia Presophi
34	02.06.01.03.07	Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio	0001	Canon		Campuran	2012						Pembelian	24,000.000	
35	02.06.01.04.01	Lemari Besi	0001	-		Besi	2014						Pembelian	4,800.000	
36	02.06.01.04.03	Rak Kayu	0001	-		Kayu/Kaca	2012						Pembelian	8,500.000	
37	02.06.01.04.03	Rak Kayu	0002	-		Kayu/Kaca	2012						Pembelian	5,000.000	Rak buku
42	02.06.01.04.04	Filling Besi/Metal	0013 s/d 0014	-		Besi	2012						Pembelian	5,700.000	
45	02.06.01.04.12	Lemari Kaca	0003	-	<200 cm; 7	Kayu dan Kaca	2014						Pembelian	8,500.000	Lemari peyimpan koran
46	02.06.01.04.12	Lemari Kaca	0004	-	2 pintu	Kaca/kayu/aluminium	2014						Pembelian	6,000.000	Lemari kaca dilengkapi lampu
48	02.06.01.05.05	Alat Penghancur Kertas	0001	Shredy Cross Cut GBC		Besi	2012						Pembelian	11,000.000	
49	02.06.01.05.05	Alat Penghancur Kertas	0002	XP Gemet / 1000C		Besi	2015						Pembelian	2,125.000	
50	02.06.01.05.24	Alat Pemotong Kertas	0001	Paper Monstern TG		Besi	2012						Pembelian	2,000.000	



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B
PERALATAN DAN MESIN

Provinsi : PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Kab./Kota : PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Bidang : Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : Biro Humas dan Protokol
U P B : Biro Humas dan Protokol
NO. KODE LOKASI : 11.24.00.04.01.04.01

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pembelian	Pabrik	Rangka	Nomor Mesin	Polisi	BPKB	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
51	02.06.01.05.24	Alat Pemotong Kertas	0002	Joyco PC-3846 / Double Folio	20	Besi	2015						Pembelian	937.500	
54	02.06.02.01.04	Meja Kayu/Rotan	0002	-		Kayu	2012						Pembelian	3,500.000	Meja Jati Ukir
55	02.06.02.01.04	Meja Kayu/Rotan	0003	Navare		Kayu/Kaca	2012						Pembelian	1,000.000	Tempat Bendera Meja Televisi
56	02.06.02.01.04	Meja Kayu/Rotan	0004	-		Kayu/Kaca	2012						Pembelian	1,500.000	Meja Televisi
59	02.06.02.01.15	Meja Podium	0001	-		Acrylic	2012						Pembelian	71,000.000	
66	02.06.02.04.01	Lemari Es	0002	LG / 171 SL		Campuran	2012						Pembelian	2,000.000	
68	02.06.02.04.04	AC Split	0001	-		BESI/PLA STIK	2008						Pembelian	6,550.000	
70	02.06.02.04.04	AC Split	0004 s/d 0005	Toshiba	2 PK	Campuran	2011						Pembelian	16,982.500	
71	02.06.02.04.04	AC Split	0006	Gree		Campuran	2012						Pembelian	9,000.000	
72	02.06.02.06.03	Televisi	0001	Sharp		Campuran	2012						Pembelian	10,000.000	
73	02.06.02.06.03	Televisi	0002	-		Campuran	2012						Pembelian	4,500.000	
74	02.06.02.06.03	Televisi	0003	LG	46"	Campuran	2014						Pembelian	62,450.000	
77	02.06.02.06.12	Wireless	0001	-		PLASTIK/LOGAM	2010						Pembelian	49,000.000	ERWINDY
78	02.06.02.06.15	Microphone Floor Stand	0001	-		Logam	2011						Pembelian	1,300.000	Standing Microphone
79	02.06.02.06.16	Microphone Table Stand	0001	-		Campuran	2011						Pembelian	400.000	Microphone Meja
82	02.06.02.06.18	Unit Power Supply	0004	UPS Ersys		Campuran	2013						Pembelian	1,477.612	Devid B P Situmorang
89	02.06.02.06.37	Tangga Aluminium	0001	-		Aluminium	2012						Pembelian	3,000.000	
93	02.06.02.06.50	Alat Rumah Tangga Lain-lain	0004 s/d 0009	-		STAINLESS	2010						Pembelian	15,000.000	PRESS LINE
198	02.06.03.02.01	P.C Unit/ Komputer PC	0005	-		LOGAM/P	2008						Pembelian	14,700.000	
199	02.06.03.02.01	P.C Unit/ Komputer PC	0006 s/d 0007	-		LASTIK Logam/PI	2010						Pembelian	13,800.000	

Biro Protokol dan Komunikasi Publik



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B
PERALATAN DAN MESIN

Provinsi : PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Kab./Kota : PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Bidang : Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : Biro Humas dan Protokol
U P B : Biro Humas dan Protokol
NO. KODE LOKASI : 11.24.00.04.01.04.01

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pembelian	Pabrik	Rangka	Nomor Mesin	Polisi	BPKB	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
200	02.06.03.02.01	P.C Unit/ Komputer PC	0008 s/d 0009	Intel Core / Di3 540@3.70 GHz		astik Logam/Plastik	2010						Pembelian	21,500.000	
201	02.06.03.02.01	P.C Unit/ Komputer PC	0010 s/d 0011	HP Compaq / CQ 3121 L		astik Campuran	2011						Pembelian	20,952.500	
202	02.06.03.02.01	P.C Unit/ Komputer PC	0012	HP Pavilion / p6 Series		Campuran	2012						Pembelian	10,235.500	Irawulan
203	02.06.03.02.01	P.C Unit/ Komputer PC	0013	Dell Studio / XPS 8300		Campuran	2012						Pembelian	26,530.400	Benito Zuares
204	02.06.03.02.01	P.C Unit/ Komputer PC	0014	HP		Campuran	2013						Pembelian	9,750.000	
205	02.06.03.02.01	P.C Unit/ Komputer PC	0015	Apple		Campuran	2013						Pembelian	9,800.000	Ipad (Ka bag Protokol)
206	02.06.03.02.01	P.C Unit/ Komputer PC	0016	Dell		Campuran	2013						Pembelian	10,750.000	Himawan Adhi Wibowo
207	02.06.03.02.01	P.C Unit/ Komputer PC	0017	Dell		Campuran	2013						Pembelian	10,750.000	Achmad Sallahudin
208	02.06.03.02.01	P.C Unit/ Komputer PC	0018	Dell		Campuran	2013						Pembelian	10,750.000	Dewi Yuliyanti
209	02.06.03.02.01	P.C Unit/ Komputer PC	0019	HP		Campuran	2013						Pembelian	9,850.749	Dra.Marianitha
210	02.06.03.02.01	P.C Unit/ Komputer PC	0020 s/d 0023	Lenovo		Campuran	2013						Pembelian	43,343.295	Media Center Bagian Pemberitaan, Publikasi dan Data
211	02.06.03.02.01	P.C Unit/ Komputer PC	0024 s/d 0025	HP		Campuran	2013						Pembelian	21,671.647	Erwindy
212	02.06.03.02.01	P.C Unit/ Komputer PC	0026 s/d 0028	Intel Core		Campuran	2014						Pembelian	37,500.000	
213	02.06.03.02.01	P.C Unit/ Komputer PC	0029 s/d 0030	HP Pavilion 23-P200d		Campuran	2015						Pembelian	34,250.000	
214	02.06.03.02.01	P.C Unit/ Komputer PC	0031 s/d 0032	HP Envy 20		Campuran	2015						Pembelian	20,000.000	
215	02.06.03.02.01	P.C Unit/ Komputer PC	0033	HP 22		Campuran	2015						Pembelian	11,250.000	
216	02.06.03.02.01	P.C Unit/ Komputer PC	0034	HP Pavilion / 23r2100coreI5		Campuran	2016						Pembelian	15,338.000	
217	02.06.03.02.01	P.C Unit/ Komputer PC	0035 s/d 0039	Lenovo		Campuran	2016						Pembelian	38,000.000	



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B
PERALATAN DAN MESIN

Provinsi : PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Kab./Kota : PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Bidang : Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : Biro Humas dan Protokol
U P B : Biro Humas dan Protokol
NO. KODE LOKASI : 11.24.00.04.01.04.01

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pembelian	Pabrik	Rangka	Nomor Mesin	Polisi	BPKB	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
218	02.06.03.02.01	P.C Unit/ Komputer PC	0040 s/d 0041	HP Pavillion / 20-r124d		Campuran	2016						Pembelian	23,700.000	
219	02.06.03.02.01	P.C Unit/ Komputer PC	0042 s/d 0043	HP Pavillion / 22-3015L		Campuran	2016						Pembelian	19,627.500	
222	02.06.03.02.02	Lap Top	0004	Toshiba		Logam/Plastik	2010						Pembelian	13,780.000	Irawulan
223	02.06.03.02.02	Lap Top	0005	Toshiba		Campuran	2015						Pembelian	12,937.500	
224	02.06.03.02.02	Lap Top	0006	Vortage / 10"		CAMPURAN	2007						Pembelian	25,700.000	Koreksi BPK tahun 2014
225	02.06.03.02.02	Lap Top	0007 s/d 0010	Dell Inspiron		Campuran	2016						Pembelian	25,100.000	
227	02.06.03.02.03	Note Book	0002	Dell		Campuran	2012						Pembelian	20,000.000	
228	02.06.03.02.03	Note Book	0003	Fujitsu		Campuran	2012						Pembelian	24,000.000	
229	02.06.03.02.03	Note Book	0004	Toshiba		Campuran	2012						Pembelian	12,000.000	
230	02.06.03.02.03	Note Book	0005	Acer		Campuran	2013						Pembelian	10,500.000	
231	02.06.03.02.03	Note Book	0006	HP		Campuran	2013						Pembelian	10,829.825	Fried Damek
232	02.06.03.02.03	Note Book	0007	Acer		Campuran	2013						Pembelian	6,895.524	Sherybety Novalia
233	02.06.03.02.03	Note Book	0008	Acer		Campuran	2013						Pembelian	6,895.524	Devid B P Situmorang
234	02.06.03.02.05	Personal Komputer Lain-lain	0001	Samsung		Campuran	2014						Pembelian	11,500.000	PC Tablet
238	02.06.03.03.12	Hard Disk	0007 s/d 0009	-		Logam	2011						Pembelian	2,600.000	
241	02.06.03.04.08	Printer	0001 s/d 0002	Epson / L220		Campuran	2016						Pembelian	8,500.000	
242	02.06.03.04.08	Printer	0003	Canon / Ip 2270		Campuran	2016						Pembelian	1,412.500	
246	02.06.03.05.02	Monitor	0001	-		Campuran	2012						Pembelian	1,800.000	
249	02.06.03.05.03	Printer	0004 s/d 0006	Canon / IP2770		Campuran	2010						Pembelian	2,850.000	
250	02.06.03.05.03	Printer	0007 s/d 0008	Canon / iP2770		Campuran	2011						Pembelian	1,982.500	



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B
PERALATAN DAN MESIN

Provinsi : PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Kab./Kota : PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Bidang : Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : Biro Humas dan Protokol
U P B : Biro Humas dan Protokol
NO. KODE LOKASI : 11.24.00.04.01.04.01

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pembelian	Pabrik	Rangka	Nomor Mesin	Polisi	BPKB	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
251	02.06.03.05.03	Printer	0009	Canon Pixma / Pro 9000		Campuran	2012						Pembelian	7,284.100	Benito Zuares
252	02.06.03.05.03	Printer	0010	Epson / L100		Canpura	2012						Pembelian	2,300.000	
253	02.06.03.05.03	Printer	0011 s/d 0015	-		Campuran	2012						Pembelian	14,000.000	
254	02.06.03.05.03	Printer	0016	Epson / Dot Matrik LX 300		Campuran	2013						Pembelian	3,300.000	
255	02.06.03.05.03	Printer	0017	CANON IP 100		Campuran	2013						Pembelian	3,940.299	Erwindy
256	02.06.03.05.03	Printer	0018	-		Campuran	2013						Pembelian	3,940.300	Erwindy
257	02.06.03.05.03	Printer	0019 s/d 0020	Epson		Campuran	2014						Pembelian	7,000.000	
258	02.06.03.05.03	Printer	0021 s/d 0023	Brother		Campuran	2014						Pembelian	10,500.000	
259	02.06.03.05.03	Printer	0024 s/d 0025	Canon IX7000 / A3		Campuran	2015						Pembelian	11,375.000	
260	02.06.03.05.03	Printer	0026 s/d 0028	Canon Pixma IP7270		Campuran	2015						Pembelian	6,000.000	
261	02.06.03.05.03	Printer	0029	Epson LQ-310 / Dot Matrix		Campuran	2015						Pembelian	3,125.000	
264	02.06.03.05.04	Scanner	0003	Epson V370		Campuran	2015						Pembelian	3,500.000	
265	02.06.03.05.07	External	0001	Seagate		Logam	2012						Pembelian	950.000	Eksternal Hard Disak
266	02.06.03.05.07	External	0002 s/d 0003	Seagate		Logam	2012						Pembelian	1,700.000	
267	02.06.03.05.11	UPS	0001 s/d 0003	Emerson		Campuran	2014						Pembelian	6,975.000	
268	02.06.03.05.11	UPS	0004 s/d 0006	ICA / 1200 VA			2015						Pembelian	7,078.500	
269	02.06.03.05.11	UPS	0007 s/d 0011	-		Logam	2016						Pembelian	10,375.000	
270	02.06.03.05.14	Harddisk Eksternal	0001 s/d 0005	Seagate / 3TB		Logam	2015						Pembelian	10,750.000	
271	02.06.03.05.14	Harddisk Eksternal	0006 s/d 0007	Seagate / 500GB		Logam	2015						Pembelian	1,500.000	
272	02.06.03.05.14	Harddisk Eksternal	0008 s/d 0010	WD My Book		Logam	2016						Pembelian	7,050.000	
273	02.06.03.05.18	Speaker Aktive Komputer	0001 s/d 0003	Sonic Gear		Campuran	2015						Pembelian	3,000.000	
275	02.06.04.07.06	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	001	-		KAYU	2007						Pembelian	1,170.000	



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B
PERALATAN DAN MESIN

Provinsi : PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Kab./Kota : PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Bidang : Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : Biro Humas dan Protokol
U P B : Biro Humas dan Protokol
NO. KODE LOKASI : 11.24.00.04.01.04.01

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pembelian	Pabrik	Rangka	Nomor Mesin	Polisi	BPKB	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
276	02.06.04.07.06	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	0003 s/d 0004	-		Kayu/Kaca	2012						Pembelian	11,000.000	
277	02.07.01.01.01	Camera + Attachment	0001	Nikon / D3S		Campuran	2012						Pembelian	75,500.000	Boy Irawan (Kamera Digital)
278	02.07.01.01.01	Camera + Attachment	0002	Nikon		Campuran	2012						Pembelian	34,900.000	Boy Irawan (kamera Digital)
279	02.07.01.01.01	Camera + Attachment	0003	Canon		Campuran	2014						Pembelian	36,000.000	
280	02.07.01.01.01	Camera + Attachment	0004 s/d 0005	Nikon		Campuran	2014						Pembelian	43,000.000	
281	02.07.01.01.01	Camera + Attachment	0006 s/d 0007	Sonny		Campuran	2014						Pembelian	16,950.000	
282	02.07.01.01.02	Photo Processing Set	0001	-		Campuran	2015						Pembelian	31,125.000	Peralatan kamera terdiri dari : 4 bh tali kamera, 1 bh lensa kamera, 1 bh monopod
283	02.07.01.01.03	Proyektor + Attachment	0001	Infocus		Campuran	2012						Pembelian	55,000.000	
285	02.07.01.01.40	Microphone/Wireless Mic	0001	TOA		Campuran	2012						Pembelian	14,500.000	
290	02.07.01.01.81	Microphone Table stand	0001	Sennheiser		Campuran	2012						Pembelian	23,500.000	Microphone Podium Mobile
303	02.07.01.01.82	Peralatan studio Visual Lain-lain	0023	Sennheiser		Campuran	2012						Pembelian	11,500.000	Clif On (Perlengkapan Sound System sepaket bersama microphone podium mobile?)
304	02.07.01.01.82	Peralatan studio Visual Lain-lain	0024	Canon		Campuran	2014						Pembelian	8,125.000	Blitz kamera
305	02.07.01.01.83	Handycam	0001	Sony / Camcorder DCR-SR68		Campuran	2015						Pembelian	6,150.000	
309	02.07.01.02.03	Camera Electronic	0002	NIKON / D 200		Logam/Plastik	2007						Pembelian	35,175.000	KAMERA DIGITAL
311	02.07.01.02.03	Camera Electronic	0004	SONY / DCR-VX2100E		LOGAM	2008						Pembelian	29,900.000	KAMERA DIGITAL MINI



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B
PERALATAN DAN MESIN

Provinsi : PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Kab./Kota : PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Bidang : Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : Biro Humas dan Protokol
U P B : Biro Humas dan Protokol
NO. KODE LOKASI : 11.24.00.04.01.04.01

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pembelian	Pabrik	Rangka	Nomor Mesin	Polisi	BPKB	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
313	02.07.01.02.03	Camera Electronic	0006	NIKON / D70S		LOGAM	2008						Pembelian	25,000.000	KAMERA DIGITAL
314	02.07.01.02.03	Camera Electronic	0007	Nikon / D1300		Campuran	2011						Pembelian	8,982.500	
315	02.07.01.02.03	Camera Electronic	0008	Nikon / D300S		Campuran	2011						Pembelian	21,000.000	
316	02.07.01.02.03	Camera Electronic	0009	SONY / DSR-PD 177P		Campuran	2012						Pembelian	54,110.000	Kamera Video plus aksesoris (tripod,baterai,m emori stik,tas) oleh boy irawan
317	02.07.01.02.03	Camera Electronic	0010	Nikon S9700 / Digital Camera		Campuran	2015						Pembelian	3,937.500	
318	02.07.01.02.03	Camera Electronic	0011	Samsung NX300 / Digital Camera		Campuran	2015						Pembelian	9,750.000	
320	02.07.01.02.63	Lensa Kamera	0001	Tamron For Nikon		Plastik	2011						Pembelian	8,900.000	
321	02.07.01.02.63	Lensa Kamera	0002	Nikon / AFS 80-200MM		Campuran	2012						Pembelian	12,700.000	Boy Irawan
323	02.07.01.02.77	Mixer PVC	0001	Behringer		Campuran	2012						Pembelian	9,750.000	Mixer Audio
325	02.07.02.01.08	Sound System	0001 s/d 0002	Sony		Campuran	2014						Pembelian	5,000.000	Voice Recorder
326	02.07.02.01.08	Sound System	0003	Motorola		Campuran	2014						Pembelian	70,000.000	Repater
334	02.07.02.01.14	Handy Talky	0021 s/d 0025	Kenwood		Campuran	2014						Pembelian	9,000.000	
335	02.07.02.01.14	Handy Talky	0026 s/d 0045	Motorolla		Campuran	2015						Pembelian	50,000.000	
336	02.07.02.01.20	Facsimile	0001	Panasonic		Campuran	2012						Pembelian	2,800.000	
337	02.07.02.06.03	Slide Projector (Lapangan)	0001	BenQ			2014						Pembelian	9,625.000	Beserta Layarnya
338	02.07.03.15.01	Microvawe FPU Portable	0001	-		Campuran	2011						Pembelian	99,750.000	TVRI Stasiun Kalimantan Tengah
339	02.07.02.01.08	Digital audio tape recorder	0001 s/d 0002	SONY ICD-AX4122F		Campuran	2016						Pembelian	6,600.000	
340	02.07.01.02.03	Kamera	0001 s/d 0002	Nikon D 5300		Campuran	2016						Pembelian	21,200.000	



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B
PERALATAN DAN MESIN

Provinsi : PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Kab./Kota : PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Bidang : Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : Biro Humas dan Protokol
U P B : Biro Humas dan Protokol
NO. KODE LOKASI : 11.24.00.04.01.04.01

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pembelian	Pabrik	Rangka	Nomor Mesin	Polisi	BPKB	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
341		Tablet	0001	Samsung		Campura	2016						Pembelian	12,200.000	
342	02.07.02.01.08	Repeater radio	0001	Motorola		Campura	2016						Pembelian	39,790.000	
Jumlah Harga													3,187,941.171		

MENGETAHUI
Kepala Biro Protokol dan Komunikasi Publik

HM. ISTANI, SH
NIP. 19630704 198803 1 015

Palangka Raya, 31 Desember 2017
Pengurus Barang Pembantu

Dewi Yuliyanti, S.Sos
NIP. 19790701 201001 2 004

Biro Protokol dan Komunikasi Publik

418,592.072

tadinya 2 buah 2340000

Biro Protokol dan Komunikasi Publik

Biro Protokol dan Komunikasi Publik

Biro Protokol dan Komunikasi Publik